

BAB IV

EFEKTIVITAS EU NAVFOR DALAM MENGATASI PEROMPAKAN SOMALIA DI TELUK ADEN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan hasil analisa tentang efektivitas oprasi anti perompakan EU Navfor dalam Mengatasi Perompakan di Teluk Aden sejak tahun 2008-2014. Selain itu, penulis akan menjelaskan dan mengklasifikasikan tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung efektivitas operasi Eu Navfor dalam mengatasi perompakan di Teluk Aden dan seputar perairan Somalia serta kawasan Tanduk Afrika secara umum. Analisa mengenai faktor-faktor efektivitas operasi dilakukan berdasarkan teori “Efektivitas Rezim” (Arield Underdal) dan mengaitkannya dengan Konsep “Cooperattif Security” sebagai bagian dari pendekatan umum.

A. EFEKTIVITAS OPERASI EU NAVFOR

Dalam melaksanakan tugas anti perompakan, unit Atalanta diberikan beberapa mandat untuk dilaksanakan. Data yang dikumpulkan sejak tahun 2008-2014 yang menjadi fokus pengamatan penulis menunjukkan bahwa Operasi Atalanta yang membangun kerjasama dengan mitra kontra-pembajakan lainnya telah sangat efektif menekan kasus perompakan dan mencegah aksi serangan perompakan. Secara bersama-sama, operasi yang dipimpin intelijen yang kuat dansikap proaktif dari unit-unit yang tergabung dalam misi Atalanta serta upaya berkesinambungan untuk mendukung industri maritim dan komunitas perdagangan terkait pentingnya langkah-langkah perlindungan diri telah menurunkan tingkat keberhasilan serangan perompakan. Pada puncak pembajakan Somalia pada Januari 2011, 736 sandera dan 32 kapal ditahan oleh Perompak Somalia. Pada Desember 2014 jumlahnya menurun menjadi 30 sandera dan tidak ada kapal yang ditahan.

Sejak peluncuran Operasi pada tahun 2008 hingga rentang waktu tahun 2014, EU Navfor (Operasi Atalanta) memiliki beberapa prestasi yang menunjukan indikator efektivitas dari

misi ini. Diantaranya yaitu mampu memastikan pengawasan untuk kapal WFP dalam mendistribusikan suplay pangan dan obat-obatan untuk penduduk Somalia. Bahkan tingkat keberhasilan dalam misi perlindungan kapal-kapal WFP ini mencapai angka 100%. Operasi Atalanta juga memberikan jaminan perlindungan keamanan terhadap pengiriman logistik dan keperluan lainnya dalam upaya mendukung keberhasilan misi African Union Mission in Somalia (AMISOM). Selain itu, pusat keamanan maritime (MSC-HOA) juga didirikan oleh Atalanta yang berkordinasi 24 jam dengan indsutri perkapalan guna menyediakan pemantauan lalu-lintas pelayaran melalui Teluk Aden dan informasi lebih lanjut tentang prosedur yang dapat dilakukan jika mengalami serangan perompakan melalui *Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy (BMP)*¹.

Dalam *Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC)*, misi Atalanta juga berkontribusi guna memastikan perlindungan pengiriman yang dianggap rentan. Atalanta mendeploy sebuah unit kapal khusus untuk diperbantukan mengawal konvoi kapal-kapal yang melintasi area dengan resiko tinggi perompakan. Biasanya dilakukan dengan rasio 1 banding 10. Yang artinya dari 1 unit kapal perang bertugas mengawal 10 konvoi kapal yang berlayar dibawah pengawasan IRTC. Satuan reaksi cepat Atalanta juga dipersiapkan dalam upaya bantuan mendesak pada kasus kapal-kapal yang meminta panggilan darurat, seperti bantuan pada kecelakaan laut dan laporan indikasi aktivitas perompakan. Upaya kontra perompakan yang dilakukan terbukti memberikan efek positif dalam mengembalikan kepercayaan kegiatan kemaritiman.

Upaya pencegahan dan penindakan dalam misi Atalanta juga menunjukkan prestasi yang baik. Dalam bidang pencegahan, Satuan Atalanta bekerjasama dengan otoritas keamanan dan kemaritiman di negara-negara seputar kawasan Tanduk Afrika dalam hal mendukung peningkatan kemampuan pasukan

¹ [http://eunavfor.eu/The Maritime Security Center-Horn of Africa\(MSCHOA\): Safeguarding trade through the High Risk Area.](http://eunavfor.eu/The%20Maritime%20Security%20Center-Horn%20of%20Africa(MSCHOA):%20Safeguarding%20trade%20through%20the%20High%20Risk%20Area)

keamanan negara setempat dalam mengatasi masalah perompakan. Aspek lain yang dilakukan satuan dalam misi Atalanta juga melakukan pendekatan secara persuasif dengan bekerjasama dan memberikan penyuluhan kepada nelayan-nelayan di wilayah pesisir Somalia untuk menghindari aktivitas perompakan. Adapun dalam hal penindakan, satuan dalam misi Atalanta dapat melakukan pemeriksaan pada kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam aksi perompakan dan bahkan diberikan mandat khusus pada tahun 2012 yang memungkinkan penindakan operasi dapat dilakukan di wilayah darat Somalia sejauh 2 kilometer untuk menghancurkan fasilitas para sindikat perompak. Para tersangka perompakan yang berhasil ditangkap juga dapat diadili secara hukum melalui transfer ke pihak otoritas yang memiliki kerjasama dengan Uni Eropa seperti Kenya dan Republik Seychelles untuk dituntut sesuai undang-undang yang berlaku di negara setempat².

1. EU Navfor Berhasil Melaksanakan Mandat

Saat dimulainya proses peluncuran pada 2008 lalu, Operasi Eu Navfor untuk mengatasi masalah perompakan Somalia diberi beberapa mandat dalam pelaksanaan tugasnya. Mandat-mandat misi Atalanta dirumuskan oleh Dewan Joint Action 851 Uni Eropa yang didasarkan dari berbagai resolusi yang dikeluarkan PBB terkait masalah perompakan di Somalia. Adapun mandat operasi Atalanta adalah untuk melindungi jalur pengiriman program pangan dunia (WFP), mendukung misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) dan mengamankan pengiriman rentan lainnya. Mendeteksi dan menindak perompakan bersenjata di laut. Juga memonitor kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai Somalia. Serta mendukung misi Uni Eropa lainnya dan organisasi internasional yang bekerja untuk memperkuat keamanan maritim dan kapasitas di wilayah tersebut.

Dalam rentang waktu 2008-2014, misi Atalanta telah menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam mengatasi masalah perompakan Somalia. Hal ini dapat dilihat dari

²<http://eunavfor.eu/mission/.2014>

capaian keberhasilan dan prestasi dari mandat yang diembankan pada satuan operasi Atalanta dalam beberapa poin yang penulis paparkan dibawah ini.

- a) Melindungi jalur pengiriman Program Pangan Dunia (WFP) dan mendukung Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM).

Melindungi kapal program pangan dunia yang mengantarkan persediaan vital ke Somalia adalah bagian penting dari mandat operasi. Sejak diluncurkan, operasi Atalanta telah berkontribusi dalam pengawalan bantuan pangan, obat-obatan dan barang sekitar 1.098.004 metrik ton ke Somalia. Pengiriman ini dilakukan melalui Mogadishu, Merka, Bossaso dan Berbera. Berdasarkan data, Sejak diluncurkan pada tahun 2008 hingga tahun 2014, kapal WFP telah melakukan pengiriman sebanyak 373 kali³.

Namun, penggunaan kapal yang relatif kecil dan lamban dari WFP membuat pengiriman menjadi sangat rentan dari ancaman aksi perompakan. Hal ini tentunya membuat misi Atalanta membutuhkan Sumber daya perlindungan militer yang lebih besar dan masif. Uni Eropa juga sangat mendorong WFP membangun kesepakatan dengan perusahaan penyediakapal untuk melakukan perbaikan regulasi terkait penggunaan ataupunewaan kapal konvoi pengiriman suplai makanan dan obat-obatanyanglebih besar dan lebih modern sebagai upaya pencegahan sekaligus pertahanan terhadap aksi perompakan.

Menurut Satuan Analisis Keamanan Pangan dan Gizi (FSNAU) dan Sistem Jaringan Peringatan Awal Kelaparan untuk Somalia yang telah memantau kondisi bencana kelaparan yang melanda negara ini. Terdapat lebih dari 2,3 juta orang yang terdampak dalam krisis yang melanda di seluruh Somalia pada tahun 2012. Ketahanan pangan dan gizi yang rapuh disebabkan oleh musim kering

³*Ibid.*

berkepanjangan, konflik sipil bersenjata, serta ketidakstabilan politik dan keamanan terus berkontribusi terhadap sulitnya mendapatkan akses pangan bagi rumah tangga miskin. Sementara upaya bantuan distribusi WFP terhadap populasi penduduk dalam krisis kelaparan pada elemen paling rentan yaitu perempuan dan anak tidak berjalan maksimal akibat adanya ancaman aksi perompakan⁴.

Namun sejauh ini sejak berada dibawah pengawasan dan perlindungan Operasi Atalanta, tidak satupun konvoi kapal WFP pernah diserang oleh perompak. Melalui Publik Affair Office Afrika Timur, WFP mengucapkan terimakasih kepada Uni Eropa dalam upaya memberikan pengawasan dan perlindungan jangka panjang terhadap kapal-kapal WFP yang menyuplay bantuan pangan bagi penduduk Somalia. Mengingat makin meningkatnya kebutuhan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Penyediaan aset pengawasan untuk WFP memberikan perlindungan dan kelancaran dalam proses pengiriman kebutuhan pangan yang kian meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 saja, presentase suplai bantuan pangan telah mencapai 63% dari total keseluruhan.

Selain itu, dukungan suplay bantuan dari Uni Eropa untuk misi perdamaian AMISOM juga dikawal dan difasilitasi oleh misi Atalanta. Dimana sedikitnya terdapat 128 konvoi kapal pendukung misi AMISOM selama kurun waktu 6 tahun sejak dirilis berhasil dilindungi oleh pasukan angkatan laut Uni Eropa dalam oprasi kontra perompakan.

⁴www.Eunavfor.Eu. World Food Programme.pdf. 2012 hal. 6.

Tabel 4.1: Data Dukungan Pengawalan WFP dan AMISOM

Since 2008-2014	
WFP Vessels Protected	373
AMIMSOM Vessel Protected	128
Tonnes of Food / Aid Delivered by WFP	1,098,004

(Sumber: Key and Fact Eunavfor)

- b) Pengamanan terhadap jalur pelayaran rentan di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden.

Pengamanan terhadap jalur pelayaran rentan di Teluk Aden dan diseputar perairan lepas pantai Somalia juga merupakan salah satu bagian dari mandat penting dalam pelaksanaan misi Atalanta. Pengamanan terhadap jalur pelayaran ini dilakukan sejak oprasi mulai dikerahkan, mengingat urgensi mengenai ancaman keamanan yang mungkin dialami oleh kapal-kapal yang melintas di perairan Teluk Aden sebagai salah satu jalur perdagangan maritime tersibuk di dunia. Teluk Aden sendiri memiliki lingkungan yang sangat kompleks, dimana terdapat begitu banyak kapal nelayan lokal dan internasional yang melintas. Selain itu yang lebih penting lagi adalah banyaknya konvoi kapal dari berbagai bendera negara yang menggunakan jalur lalu lintas maritim ini sebagai sarana arus pengiriman barang, ekspor impor suplai minyak dunia, serta sebagai perlintasan bagi kapal-kapal pesiar mewah.

Laksamana Muda Hudson mengatakan bahwa terdapat sekitar 25.000 kapal transit di wilayah seputar Tanduk Afrika setiap tahunnya, terutama melalui Teluk Aden yang mewakili sekitar 25% area vital strategis dari jumlah total perdagangan global. Jalur Teluk Aden sangat penting bagi Rute pasokan perdagangan maritim dari atau ke Asia, Eropa dan Amerika. Kapal peti kemas menuju ke timur jauh juga secara teratur menggunakan rute itu. Rata-rata antara 75 sampai 100 kapal transit setiap hari.

Di Wilayah Operasi, unit Atalanta melakukan tugas patroli sesuai dengan Mandat. Mengawal konvoi kapal

WFP dan AMISOM yang mengangkut bantuan kemanusiaan (Atau logistik untuk misi Uni Afrika). Serta memastikan keamanan perjalanan konvoi kapal yang melintas di Teluk Aden dan Samudra Hindia dibawah koridor transit IRTC. Biasanya akan ada 1 kapal perang yang ditugaskan khusus untuk mengawal konvoi kapal. Pusat keamanan maritime (MSC-HOA) yang didirikan oleh Eu Navfor berkordinasi 24 jam dengan industri perkapalan guna menyediakan pemantauan lalu-lintas pelayaran melalui Teluk Aden. Selain itu, Patroli Atalanta juga secara aktif merespon setiap panggilan darurat yang mungkin disebabkan oleh ancaman perompakan atau kecelakaan laut dengan menyiapkan sebuah armada khusus untuk surveilans. Inisiatif ini mendapatkan sambutan yang baik dari seluruh komunitas industri perkapalan dan pihak-pihak yang menggunakan jalur perairan Teluk Aden. Dengan adanya sistem perlindungan dan pengamanan yang dibangun Eu Navfor dapat memberikan rekomendasi untuk mengetahui pengaturan apa saja yang diperlukan untuk mencegah upaya perompakan sekaligus mengurangi risiko pembajakan⁵.

c) Pencegahan dan Penindakan Terhadap Aksi Perompakan.

Pencegahan terhadap aksi perompakan juga merupakan salah satu misi dalam mandat operasi Atalanta di Teluk Aden dan seputar perairan Somalia serta belakangan juga di arahkan sebagian wilayah Samudra Hindia. Pencegahan dilakukan dengan patroli kapal perang dan pesawat pemantau udara di titik-titik rawan. Pasukan dalam operasi ini setidaknya terdiri dari 4–7 unit kapal perang dan 2–4 unit kapal patroli maritim serta 2 pesawat pengintai. Untuk kegiatan ini, Uni Eropa mengeluarkan biaya kurang lebih sebanyak €215 juta dengan jangka investasi 2008-2013⁶. Konvoi kapal yang melintas juga

⁵ Evangelos Soufis.2012.Case Study of European Union Antipiracy Operation Naval Force Somalia Successes, Failures and Lessons Learned for the Hellenic Navy. Theses and Dissertations. Pdf. Hal.14.

⁶ <http://eunavfor.eu.com>. 2014

disarankan untuk melapor pada pusat komunikasi International Recommended Transit Corridor (IRTC) untuk dibimbing dan diawasi dalam pelayaran. IRTC merupakan jalur yang dibentuk demi mengamankan kapal-kapal yang melintasi perairan Teluk Aden dari aksi perompakan. IRTC ini dibentuk oleh kerja sama antara Combined Maritime Forces (CMF), NATO, dan Uni Eropa. Kerja sama ini disebut Shared Awareness and Deconfliction (SHADE). Kapal-kapal perang yang diberangkatkan Uni Eropa membentuk patroli yang dipusatkan di area IRTC dan tersebar di High Risk Area (HRA) yang sudah disepakati di dalam Best Management Practice (BMP)⁷. Biasanya akan ada 1 kapal perang yang beroperasi khusus untuk mengawal konvoi yang terdiri dari beberapa kapal. Selain Angkatan Laut Uni Eropa, Negara-negara lain juga terlibat dan memberikan dukungan dalam Operasi Atalanta dengan mengirimkan pasukan militernya untuk berpatroli di kawasan Teluk Aden.

Beberapa upaya persuasif lainnya juga dilakukan dengan membangun kerjasama dan himbuan pada penduduk pesisir dan nelayan lokal untuk lebih waspada dan menghindarkan dari aksi kriminal perompakan. Adapun penindakan pada perompak yang terbukti melakukan aksi perompakan dapat di tangkap dan dituntut oleh Negara Anggota Uni Eropa, oleh Regional Serikat, dan atau dengan negara lain (pihak ketiga) seperti Kenya, Seychelles dan Mauritania yang memiliki perjanjian dengan Uni Eropa dan yang ingin melaksanakan yurisdiksinya atas tersangka perompak. Para Perompak tidak dapat ditransfer ke negara ketiga jika relevan dengan Hukum Internasional, terutama Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi.

Sejauh ini, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan melalui pengoprasian Maritim Security Centre - Tanduk Afrika (MSC-HOA) dan patroli pengamanan secara aktif diseputar daerah rawan pembajakan dengan

⁷*Ibid*

melakukan pemeriksaan yang dimungkinkan pada kapal-kapal yang dicurigai terbukti dapat meredam potensi gangguan keamanan dari masalah perompakan. Selain itu, adanya kerangka hukum yang jelas membantu satuan operasi Atalanta dalam tugas mengatasi perompakan termasuk dengan menuntut dan mengadili perompak yang terbukti melakukan kejahatan pembajakan berdasarkan mekanisme hukum yang telah disepakati melalui kerjasama dengan negara lain yang memiliki otoritas dalam terkait hal ini seperti Kenya dan Seychelles⁸. Dalam 4 tahun pelaksanaan penindakan hukum bagi perompakan hingga februari 2012, tercatat sekitar 1.000 orang telah ditangkap dan menjalani proses hukum di 21 negara⁹.

d) Memantau Kegiatan Penangkapan Ikan di Lepas Pantai Somalia

Seperti yang diketahui, bahwa Somalia merupakan perairan yang menjadi rumah bagi tempat pemancingan terkaya di Afrika. Kapal-kapal asing dari berbagai negara berkontribusi pada eksploitasi penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) terhadap populasi ikan todak, kakap, marlin, dan hiu di perairan Somalia. Kapal-kapal asing yang menggunakan pukat dasar (*bottom trawl*) melakukan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan bertindak berdasarkan impunitas, menyeret jaring-jaring berukuran besar, menghancurkan dasar laut dan merusak habitat laut yang vital seluas 120.000 kilometer persegi (46.000 mil persegi)¹⁰. Eksploitasi menjadi mudah terjadi sebab tidak adanya kekuatan angkatan laut yang cukup dari pemerintah Somalia akibat instabilitas politik dan pemerintahan.

Sedangkan pada tahun 2009, sebuah artikel dari majalah "*Time*" menyoroti transformasi perairan Somalia

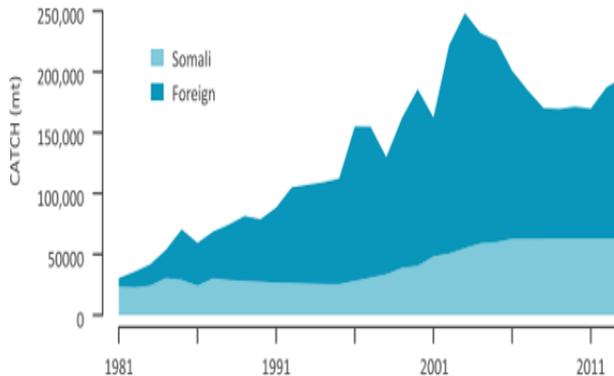
⁸*Ibid*

⁹<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-Mencariperompaksomaliadariudara.21-2-2012.htm>.

¹⁰<https://sustainabilityandenvironment.PerompakSomaliayangBaru.HassanSheikhMohamudProjectSyndicate.html>.

yang menjadi situs memancing gratis dari kapal-kapal asing berbagai negara hadir diperairan Somalia secara illegal mengumpulkan lebih dari \$ 300 juta dengan menangkap ikan laut duakali lipat atau bahkan lebih banyak dari pada nelayan Somalia.¹¹.

Gambar 4.1: Perkiraan Tangkapan Ikan Di Perairan Somalia



(Sumber : Mengamankan Perikanan Somalia.2015)

Meskipun terdapat sejumlah kemajuan dalam penguatan pengelolaan perikanan domestik dalam pemberantasan “*Illegal Fishing*” melalui aturan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU). Namun pemerintah Somalia masih memiliki kelemahan dalam mengamankan dan mengawasi wilayah perairannya yang luas. Oleh karena itu, Somalia membutuhkan dukungan dari aktor internasional lain dalam membantu menangani masalah illegal fishing ini. Dukungan komunitas internasional diharapkan dapat membuat perbedaan yang signifikan di bidang ini dengan membantu melakukan pengawasan dan mengendalikan *Zona Ekonomi Eksklusif*

¹¹<https://www.brookings.edu/MariamaSnow/blog-africa-in-focus.figures-of-the-week-piracy-and-illegal-fishing-in-somalia/2017/04/12/.html>.

(ZEE) Somalia serta menyempurnakan pertukaran informasi yang diperoleh dari patroli angkatan laut internasional.

Mandat operasi Atalanta yang diberikan Uni Eropa untuk memonitor overfishing yang dilakukan secara illegal di lepas pantai Somalia juga membantu Somalia dalam upaya menangani masalah ini. Sebab peningkatan aksi perompakan berkaitan erat dengan masalah ini. Oleh karena itu, Operasi Atalanta melaksanakan tugas berdasarkan mandat PBB dan hukum internasional yang berlaku dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Tujuannya adalah mencegah pengeksploitasian hasil laut yang dilakukan oleh berbagai kapal penangkap ikan asing. Selain itu, dukungan juga diberikan pada upaya pembangunan kembali industri perikanan Somalia dan upaya mencegah pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Uni Eropa dan sebuah organisasi nirlaba asal Inggris (Oxfom) yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana pada tahun 2014 meluncurkan program 3 tahun baru untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan rakyat Somalia. Termasuk pengolahan dan perdagangan dan pengelolaan pesisir terkait penegakan Konvensi Basel tentang penghapusan dan pembuangan limbah berbahaya. Proyek yang diluncurkan ini merupakan bagian dari program pendanaan € 5 juta yang akan dilaksanakan di Somaliland dan Puntland. Sejauh ini upaya tersebut cukup berhasil dan diperluas ke beberapa wilayah pesisir Somalia lainnya¹².

- e) Mendukung berbagai misi Uni Eropa dan Organisasi Internasional lainnya dalam upaya menjaga stabilitas keamanan maritime di Teluk Aden.

Mandat Atalanta dilaksanakan dengan membangun beberapa kerja sama dengan berbagai institusi untuk kelancaran misi mewujudkan keamanan di Teluk Aden.

¹²<https://reliefweb.int/report/somalia/eu-boosts-somali-fishing-industry.10/7/2014.html>

Secara global, Operasi Atalanta bekerjasama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam urusan penyelesaian secara hukum dan juga bekerjasama untuk mengawal kapal milik WFP. Sampai dengan tahun 2014 operasi Atalanta telah berkontribusi sebanyak 373 kali dalam pengawalan bantuan pangan, obat-obatan dan barang sekitar 1.098.004 metrik ton ke Somalia. Sejauh ini berjalan sangat efektif dalam pengawalan misi Atalanta dan tak ada kapal WFP yang berhasil dibajak¹³. Di tingkat regional, Operasi Atalanta bekerjasama dengan AMISOM dalam pelatihan militer Uni Afrika dan pengawalan kapal AMISOM. Sedikitnya terdapat 128 konvoi kapal dalam dukungan misi AMISOM selama kurun waktu 6 tahun berhasil dikawal operasi Atalanta. Selain itu, Uni Eropa juga memiliki misi EUCAP Nestor sebagai misi *capacity building* di negara-negara kawasan Tanduk Afrika termasuk di Somalia sendiri. Misi EUCAP-Somalia di bangun dalam kerangka memperkuat kapasitas keamanan kemaritiman agar dapat menegakkan pengawasan dan penindakan secara hukum dengan lebih efektif. Bersama dengan misi-misi lain Uni Eropa dan negara serta organisasi internasional lainnya, operasi Atalanta membangun kerjasama dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. Pelatihan dan pengembangan kemampuan operasional satuan polisi maritim di Mogadishu, penjaga pantai Somaliland dan polisi pelabuhan di Bosasso oleh EUCAP-Somalia juga merupakan hasil kerjasama dan kontribusi dari operasi Atalanta. Begitupun dengan dukungan pada misi bantuan PBB (UNSOM)¹⁴.

Dalam tingkat bilateral, Uni Eropa mendukung Transitional Federal Government (TFG) sebagai pemerintahan transisi Somalia dan juga memberikan pelatihan kepada militer Somalia melalui misi EUTM ditahun 2010. Tercatat EUTM telah melatih 3.600 personil tentara Somalia dan sejak 2014 mulai program “Train the

¹³ Eunavfor.eu. Loc.Cit

¹⁴<https://www.eucap-som.eu/fact-sheet/.2017>

Trainers” sebanyak 60 prajurit tentara nasional Somalia oleh 16 pelatih Uni Eropa di kamp pelatihan Jazerah Mogadishu. Tim penasihat EUTM Somalia juga mulai menawarkan saran strategis kepada Kementerian Pertahanan dan Staf Umum Somalia. Selain itu, peningkatan kapasitas, saran dan mentoring kusus yang berkaitan dengan pengembangan dan pelatihan sektor keamanan¹⁵.

2. Penurunan Angka Kasus Perompakan

Perompakan di wilayah Teluk Aden dan seputar perairan Somalia yang mulaimengalami siklus peningkatan aktivitas perompakan yang mengkhawatirkan telah menimbulkan reaksi perlawanan dari masyarakat internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional yang memiliki kepentingan kemudian mengambil sikap tegas dengan meluncurkan kebijakan operasi militer dan pengamanan guna mengatasi masalah perompakan ini. Uni Eropa juga merupakan salah satu aktor internasional yang mengambil langkah nyata pada penghujung tahun 2008 dengan merilis operasi EU Navfor atau biasa disebut dengan misi Atalanta.

Kehadiran pasukan militer dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Misi Atalanta sedikit banyak telah memberikan efek positif bagi keamanan jalur perdagangan maritim di kawasan Teluk Aden. Berdasarkan rangkuman data *Key and Fact* yang dirilis oleh Eu Navfor pada 2015, efektivitas misi Atalanta mulai terlihat mengalami keberhasilan pada tahun 2012. Angka serangan dan tingkat keberhasilan perompakan mengalami penurunan yang sangat drastis. Dimana terdapat 35 total kasus serangan saja jika dibandingkan dengan periode puncak kasus serangan pada tahun 2011 yang mencapai 176 kasus. Selain angka kasus serangan yang menurun, kehadiran oprasi Atalanta juga sangat efektif dalam menekan jumlah sandera. Sejak diluncurkan pada 2008 hingga rentang waktu 2014, keberhasilan misi Atalanta telah menjadi sangat signifikan dalam hal penurunan angka kasus perompakan.

¹⁵http://ceas.europa.eu/top_stories_eutm_somalia_en.2014.html.

Tercatat pada tahun 2014 hanya ada 5 upaya gangguan dan 2 total serangan yang terjadi serta tak ada satupun kapal dan sandera yang ditawan oleh para perompak¹⁶.

Penurunan kasus perompakan yang mencapai angka sangat rendah di Teluk Aden pada tahun 2014 merupakan indikasi kuat dari keberhasilan Operasi Eu Navfor yang melaksanakan tugas kontra perompakan. Upaya-upaya ini mencegah serangan perompakan dengan membangun pusat keamanan maritime (MSC-HOA) yang bekerja sama dengan IRTC sebagai pusat pengawasan dan pengamanan lalu-lintas pelayaran kawasan rentan. Serta memberikan panduan dan dukungan dalam bisnis perdagangan maritim terhadap perusahaan perkapalan melalui *Best Management Practice* (BMP) telah menunjukkan kemajuan yang sangat efektif dalam upaya Uni Eropa mengatasi masalah perompakan Somalia.

B. FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG EFEKTIVITAS EU NAVFOR

Seperti yang telah diketahui, bahwa Eu Navfor merupakan jenis operasi angkatan laut pertama yang dirilis Uni Eropa pada 8 Desember 2008 yang merupakan bagian dari *Common Security and Defence policy* (CSDP). Keberhasilan Eu Navfor yang merupakan produk kebijakan Uni Eropa dalam upaya mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden menunjukkan efektivitas rezim Uni Eropa dalam mencapai tujuannya. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan rezim Uni Eropa melalui operasi Eu Navfor yang mampu secara efektif mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden, penulis menganalisa keberhasilan tersebut dengan menggunakan teori “Efektivitas Rezim” yang dikemukakan oleh Arield Underdal dan mengkolaborasikannya dengan konsep “cooperative security”.

Dalam efektivitas sebuah rezim internasional terdapat upaya secara kolektif untuk mengimplementasikan suatu

¹⁶https://datakey_facts.eunavfor.2015htm

kebijakan untuk mengatasi suatu masalah. Namun, dalam realitasnya terdapat kondisi-kondisi yang berbeda mengenai efektivitas kebijakan dari setiap rezim. Dalam beberapa hal sebuah rezim dapat berhasil mencapai tujuannya dan dalam kasus lain ada pula yang mengalami kegagalan. Terdapat dua hal yang menjadikan efektivitas rezim ini berbeda, yang pertama adalah mengenai kapasitas yang dimiliki dalam artian beberapa upaya jauh lebih efektif ketika institusi memiliki kekuatan dan keterampilan serta kemampuan yang cukup besar dan kuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan yang kedua yaitu tentang karakter dari sebuah masalah yang dihadapi. Ada beberapa masalah yang memiliki karakter secara intelektual dan politik tidak begitu rumit sehingga lebih mudah untuk diatasi¹⁷.

Dalam hal kapasitas rezim, operasi Atalanta yang diluncurkan oleh Uni Eropa memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup memadai untuk mengatasi masalah perompakan Somalia. Begitupun halnya dengan tipologi masalah yang dihadapi yang tak begitu rumit untuk disepakati karena urgensi masalah perompakan telah menarik perhatian negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyamakan persepsi dalam mengambil sikap untuk kepentingan bersama yang tentunya berdampak positif dalam koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan. Pentingnya jalur perairan Teluk Aden yang menghubungkan Asia dan Eropa memang telah menjadi fokus perhatian Uni Eropa dalam hal keamanan di wilayah tanduk Afrika. Selain itu, adanya upaya-upaya kolektif melalui unsur negara-negara dan organisasi internasional lain yang ikut berpartisipasi dalam kerjasama keamanan guna menjaga stabilitas jalur perdangan laut di Teluk Aden dari serangan perompak-perompak Somalia turut mendukung dan memudahkan efektivitas operasi Atalanta dalam mengatasi permasalahan perompakan ini. Sebab perompakan di Teluk Aden telah menjadi masalah transnasional yang mengawatirkan bagi kapal-kapal berbendera asing termasuk kapal-kapal Uni Eropa yang melintas di perairan strategis lalu-

¹⁷Underdal, Arild. One Questions, Two Answer. [Pdf]. Hal. 3-4.

lintas perdagangan ini. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan perompakan ini dibutuhkan penanganan secara kolektif.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, penulis menganalisa faktor-faktor efektivitas kebijakan rezim Uni Eropa melalui operasi Eu Navfor yang terbukti mampu mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden. Faktor-faktor efektivitas tersebut di klasifikasikan dalam hal; kemampuan Intitusi, tipologi masalah dan kerjasama yang dibangun.

1. Kemampuan Institusi Uni Eropa

a) Pengaruh Uni Eropa Didunia Internasional

Besarnya ukuran Uni Eropa yang terdiri atas 28 Negara Anggota secara ekonomi, perdagangan dan keuangan membuatnya menjadi sebuah kekuatan utama di dunia. Uni Eropa memainkan peran penting dalam permasalahan global dan nilai pentingnya semakin besar karena negara-negara Uni Eropa semakin banyak membuat keputusan-keputusan kebijakan luar negeri secara bersama. Mulai dari pemanasan global sampai konflik di Timur Tengah dan upaya pembangunan negara-negara Afrika. Dasar kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa adalah penggunaan diplomasi yang apabila perludidukung dengan perdagangan, bantuan keuangan serta pertahanan dan keamanan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan internasional.

Uni Eropa telah mengirimkan misi-misi pemeliharaan perdamaian ke beberapa bagian dunia yang mengalami konflik seperti di Georgia pada tahun 2008. Misi Pemantau Uni Eropa di Georgia mengamati situasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang harus mengungsi akibat peperangan. DiKosovo, Uni Eropa mengirimkan pasukan polisi berkekuatan 1.900 orang pada bulan Desember 2008

untuk menegakkan hukum dan ketertiban (EULEX Kosovo)¹⁸.

Uni Eropa membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia termasuk para pemain baru yang memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing. Uni Eropa berupaya memastikan bahwa kemitraannya didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama. Dimana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni Eropa mengadakan pertemuan secara teratur dengan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Rusia, India dan Cina. Hubungannya dengan negara-negara tersebut dan dengan negara-negara lain mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, lingkungan, pertahanan dan keamanan, kriminalitas dan hak asasi manusia¹⁹.

Sebagaimana halnya dengan Rusia, Uni Eropa berupaya memperkuat hubungan dengan Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova dan Ukraina. Uni Eropa menawarkan pendanaan yang besar untuk negara-negara tersebut serta prospek perjanjian perdagangan bebas apabila negara-negara tersebut melaksanakan reformasi politik dan ekonomi untuk memperkuat demokrasi. Setelah terjadinya Gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) pada tahun 2011, Uni Eropa meluncurkan kembali Kebijakan Kawasan Eropa (European Neighbourhood Policy) untuk menyatakan solidaritasnya dengan pihak-pihak yang menyerukan demokrasi. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya di kawasan timur dan selatan dengan menawarkan keterkaitan politik, integrasi ekonomi dan peningkatan mobilitas. Uni Eropa memberikan jenis dukungan yang berbeda dalam upaya-upaya internasional untuk mencapai

¹⁸[https://eeas.europa.eu.KebijakanLuarNegeridanKeamananBersama\(CFSP\)/del egations/indonesia_id](https://eeas.europa.eu/KebijakanLuarNegeridanKeamananBersama(CFSP)/del egations/indonesia_id)

¹⁹*Ibid.*

perdamaian di Timur Tengah. Sebuah pengaturan dua negara di mana negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel merupakan tujuan Uni Eropa. Uni Eropa bekerjasama dengan PBB, Amerika Serikat dan Rusia secara bersama-sama untuk mendorong kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan. Dengan Iran, Uni Eropa memiliki peran yang tidak kalah aktifnya, di mana Uni Eropa memimpin berbagai perundingan yang bertujuan untuk mendorong Iran mengurangi pengayaan program nuklirnya. Uni Eropa juga mengintensifkan hubungan dengan kelompok-kelompok regional, terutama di Asia dan Amerika Latin. Peningkatan kemitraan meliputi unsur ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan lain-lainnya²⁰.

Dalam pembuatan keputusan utama, Dewan Eropa yang terdiri atas 28 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Anggota Uni Eropa bertemu empat kali dalam setahun. Para anggota Dewan Eropa bertugas menentukan prinsip-prinsip dan pedoman umum kebijakan untuk memastikan keterpaduan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri. Uni Eropa memiliki Perwakilan Tinggi yang memimpin pertemuan bulanan dalam Dewan Urusan Luar Negeri (Foreign Affairs Council) di mana para Menteri Luar Negeri Anggota Uni Eropa bertemu dan juga mengikuti pertemuan Dewan Eropa serta memberikan laporan tentang permasalahan luar negeri.

Dalam menangani hubungan diplomatik dengan negara-negara di luar Eropa, Uni Eropa memiliki European External Action Service (EEAS) sebagai layanan diplomatik. Peran dari EEAS adalah untuk mendukung Perwakilan Tinggi Uni Eropa. EEAS memiliki jaringan yang terdiri lebih dari 139 Delegasi dan Kantor di seluruh dunia yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan-kepentingan Eropa. Badan tersebut bekerjasama secara

²⁰*Ibid.*

erat dengan Komisi Eropa dan Kementerian Luar Negeri Negara-Negara Anggota Uni Eropa²¹.

Pengaruh Uni Eropa dalam kancah internasional yang terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang telah menjadikannya sebagai salah satu aktor utama dunia internasional. Meski belum bisa menyamai pengaruh dan dominasi Amerika Serikat, tetapi Uni Eropa terus berusaha meningkatkan peran pentingnya secara ekonomi, politik dan keamanan. Uni Eropa memberikan jenis dukungan yang beragam dalam upaya-upaya internasional untuk menangani konflik dan mencapai perdamaian. Kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi masalah perompakan Somalia melalui peluncuran operasi EU Navfor yang merupakan operasi angkatan laut pertama dalam jenisnya memberi sinyal tentang eksistensi Uni Eropa untuk lebih menegaskan peran dan pengaruhnya dalam skala global. Dengan kapasitas dan pengaruh luas yang dimiliki, tentunya berbagai misi yang diluncurkan oleh Uni Eropa termasuk dalam misi kontra perompakan Somalia di Teluk Aden dapat mencapai hasil yang efektif dengan dukungan instrument diplomasi dan penggunaan militer maupun bantuan gelontoran dana.

b) Kekuatan Militer Uni Eropa

Meskipun belum memiliki pasukan militer tetap dan masih mengandalkan deploy militer dari negara-negara anggotanya, namun Uni Eropa telah mengirimkan berbagai misi-misi pemeliharaan perdamaian ke beberapa di berbagai belahan dunia yang mengalami konflik. Hal ini menunjukkan peran Uni Eropa dalam bidang keamanan terus berkembang menjadi semakin besar. Sepanjang dasawarsa terakhir saja, Uni Eropa telah melaksanakan 23 misi sipil dan operasi militer di tiga benua (Eropa, Afrika dan Asia) yang dikerahkan untuk menangani berbagai krisis,

²¹*Ibid.*

mulai dari pembangunan perdamaian pasca-tsunami di Aceh, hingga melindungi para pengungsi di Chad dan perangmelawan perompakan di kawasan pantai Somalia dan Tanduk Afrika atau yang dikenal dengan oprasi EU Navfor. Dengan adanya Kebijakan Pertahanan dan Keamanan bersama (CSDP), Uni Eropa dapat melakukan intervensi dalam berbagai hal, seperti :

1. Operasi gabungan pelucutan senjata
2. Tugas kemanusiaan dan penyelamatan
3. Penasihat dan bantuan militer
4. Pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian
5. Tugas pasukan tempur dalam penanganan krisis, termasuk pemeliharaan perdamaian dan stabilisasi pasca-konflik.

Semua tugas tersebut dapat berkontribusi dalam perang melawan terorisme, termasuk dengan mendukung negara-negara non-Uni Eropa dalam memerangi terorisme di wilayah mereka. Selain itu apabila disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Uni Eropa juga dapat melaksanakan operasi tanggap cepat dengan mengerahkan dua buah grup tempur tunggal berkekuatan 1.500 orang secara bersamaan²².

Dalam misi kontra perompakan Somalia di Teluk Aden atau yang dikenal dengan Operasi Atalanta, Uni Eropa menjadwalkan untuk periode awal dua belas bulan pertama yang dimulai pada 13 Desember 2008. Tetapi dalam perkembangannya terus mengalami perpanjangan oleh Dewan Uni Eropa hingga saat ini. Selama periode awal pelaksanaan, hanya terdapat delapan negara anggota Uni Eropa yang memutuskan untuk memutuskan berkontribusi secara permanen diantaranya adalah : Italia, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, Belgia, Luksemburg dan Yunani. Namun sejumlah personel militer Siprus, Irlandia, Finlandia,

²²*Ibid.*

Malta dan Swedia turut diperbantukan untuk melengkapi tim di Kantor Pusat Operasi Northwood (United Kingdom). Northwood juga merupakan salah satu dari lima Operation Headquarters (OHQ) nasional yang tersedia untuk operasi militer Uni Eropa selain yang ada di Perancis, Jerman, Italia dan Yunani²³.

Negara anggota Uni Eropa menerima permintaan Inggris untuk memimpin operasi ini karena Inggris dianggap memiliki kemampuan pengalaman maritim dan sumber daya yang tepat untuk menjalankan misi Atalanta. Sekitar 20 kapal dan pesawat dikerahkan di seluruh operasi. Terdapat 1.200 orang mengambil bagian dalam operasi selama tahun pertama penyebaran. Pada awal operasi, pasukan yang dideploy oleh komandan operasional adalah 4 frigat dari Perancis, Jerman, Inggris dan Yunani (sebagai komandan pasukan onboard). Biasanya kapal harus mencakup 1.200nm tetapi ada beberapa unit yang bertugas untuk menutupi area yang sangat luas sekitar 2 juta km persegi di lautan. Kekuatan angkatan laut Eropa beroperasi di zona yang terdiri dari selatan Laut Merah, Teluk Aden dan bagian dari Samudra Hindia meliputi Seychelles, Mauritius dan Comoros²⁴.

Tabel 4.2 : Kekuatan Aset EU Navfor Yang Terlibat Di Tahun 2008-2009

²³<http://nasional.kompas.com/uni.eropa.turun.tangan.atasi.bajak.laut.somalia.html>.

²⁴Soufis.Op.Cit. Hal.15.

	Mounth												
Nation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GR	Frigate Psara												
SE	2 Patrol Boat/Corvets+Support												
UK	Frigate HMS												
GE	Frigate Fgs Rheinland Pfalz												
FR	Frigate Floreal												
ES	Frigate Victoria & Reconnaissanceairaft												

(Sumber: Calhoun: Arsip Kelembagaan NPS Repositori Dspace)

Berdasarkan data yang dirangkum oleh penulis sejak dimulainya operasi pada tahun 2008 hingga 2016, menunjukkan setidaknya terdapat hingga lebih 100 kapal dan sejumlah Pesawat Patroli Maritim yang telah berpartisipasi dan beroperasi dalam misi Atalanta²⁵. Aset tersebut berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa maupun kontribusi dan dukungan dari negara non anggota Uni Eropa. Kekuatan militer Atalanta berpartisipasi mempertahankan kekuatan di wilayah yang diinginkan hanya selama ada krisis. Adapun bentuk partisipasi tidak wajib, namun negara-negara anggota Uni Eropa menyatakan secara sukarela memutuskan tentang kapan dan bagaimana untuk berpartisipasi. Meskipun tanggung jawab untuk penempatan terletak pada masing-masing negara anggota yang berpartisipasi, perencanaan untuk penyebaran kekuatan memerlukan koordinasi dan persiapan awal yang berada di bawah naungan Komandan Operasi (Operation Commander). Kehadiran angkatan laut internasional yang juga cukup besar di zona Tanduk Afrika memberikan dukungan signifikan kepada kekuatan angkatan laut Eropa. Operasi Atalanta juga menjadi penghubung permanen dengan pasukan lain, termasuk CTF-151, NATO

²⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Deploy_unit_Operation_Atalanta.

Maritime Group, kapal Rusia, India, Jepang dan Cina²⁶.

Tabel 4.3 : Kekuatan yang terlibat pada periode 2008-2016

NO	NEGARA	KAPAL	PESAWAT	TOTAL
1	Belgia	2	-	2
2	Jerman	12	1	13
3	Belanda	9	-	9
4	Italy	14	-	14
5	Prancis	14	-	14
6	Portugal	2	1	4
7	Spanyol	16	2	18
8	Inggris	2	1	3
9	Yunani	4	-	4
10	Swedia	4	-	4
11	Norwegia	1	-	1
12	Finlandia	1	-	1
13	Rumania	1	-	1
14	Ukraina	1	-	1
15	Selandia Baru	-	1	1
16	Colombia	1	-	1
TOTAL		84	6	90

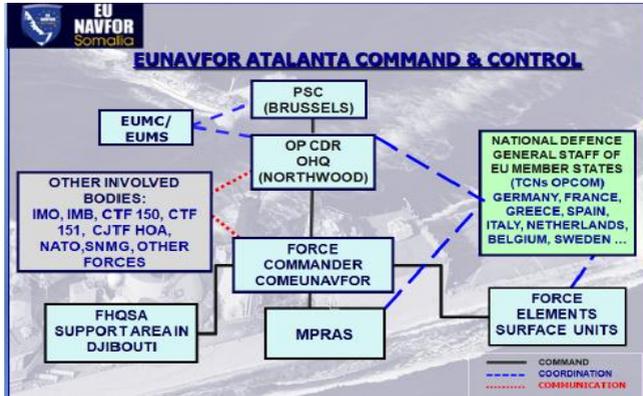
(Sumber : Deploy Unit Operation Atalanta 2017)

Dalam Operasi Atalanta struktur militer strategis operasi (OHQ) berlokasi di Northwood London. Markas komando di Northwood berfungsi sebagai tempat perencanaan dan penyusunan operasi dalam hubungannya dengan otoritas politik dan militer dari Uni Eropa. Dibawahnya adalah tingkat operasional komando angkatan laut yang bertugas mengontrol semua kekuatan militer di Area Operasi dari Markas Besar Angkatan (FHQ). Selain itu, komandan angkatan juga bertanggung jawab untuk perencanaan,

²⁶Evangelos Soufis.2012.Case Study of European Union Antipiracy Operation Naval Force Somalia Successes, Failures and Lessons Learned for the Hellenic Navy.Theses and Dissertations.Pdf.Hal.14-15.

orkestrasi dan pelaksanaan kegiatan militer taktis dan berkontribusi terhadap Perencanaan Operasional di OHQ²⁷.

Gambar 4.2 : Struktur Operasi EU Navfor



(Sumber : Arsip Kelembagaan NPS Repositori Dspace)

c) Pendanaan dan Logistik

Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pasar global setelah Amerika Serikat. Banyak hal yang dilakukan Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dan politik, di antaranya dengan memberikan bantuan dana ke negara-negaraberkembang dan Negara yang sedang mengalami konflik serta bencana kemanusiaanseperti Somalia.

Selama lebih dari dua dekade terakhir, Somalia telah mengalami berbagai macam bencana kemanusiaan dan kemiskinan serta instabilitas politik dan pemerintahan yang diakibatkan oleh kekeringan, konflik dan perang sipil yang berkepanjangan. Kondisi Negara Somalia yang sangat memperhatikan kemudian mempengaruhi keseimbangan stabilitas

²⁷Op.Cit. Eunavfor pdf.2012. Hal.3

perekonomian dan keamanan dinegara itu. Data PDB pertahun dari World Bank pada tahun 2011 untuk negara Somaliadiperkirakanhanya sebesar \$ 600, dimana 73% penduduk hanya berpenghasilan dibawah \$2 perhari. PBB bahkan mengkalisifikasikan Somalia sebagai salah satu Negara *Fail Stated*²⁸.

Keterlibatan Uni Eropa di Somalia telah meningkat selama bertahun-tahun dan Uni Eropa merupakan pendonor terbesar untuk Somalia baik dalam hal keterlibatan politik maupun dukungan keuangan dan teknis serta keahlian. Sejak awal 1994 KomisiEropa telah memberikan bantuan kemanusiaan. Dukungan ini mencakup respon kesiapsiagaan darurat dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, nutrisi, tempat tinggal, air, sanitasi kebersihan, perlindungan haksipil, pendidikan, serta pembangunan keamanan dan bantuan koordinasi. Bantuan operasi terutama berfokus pada daerah yang paling terkena dampak langsung oleh kekeringan parah di Somalia yang terus meluas yaitu Puntland dan Somaliland²⁹.

Sejak tahun 2008, Uni Eropa telah memberikan lebih dari € 1,2 miliar kenegara Somalia melalui berbagai sumber keuangan. “Somalia Compact” adalah contoh kerangka menyeluruh yang dibuat Uni Eropa untuk mengkoordinasikan upaya-upaya politik dan pembangunan untuk kegiatan-kegiatan perdamaian dan pembangunan keamanan di Somalia. Sebagian besar pendanaan pembangunan Uni Eropa ke Somalia dibiayai oleh dana pembangunan Eropa. Dalam siklus pendanaan pada tahun 2008-2013, Uni Eropa mendedikasikan sekitar € 422 juta untuk berbagai program di Somalia. Adapun fokus utamanya yaitu pada upaya pembangunan negara, pendidikan, pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Suatu

²⁸<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html>.

²⁹https://ec.europa.eu/countries/somalia_Kerjasama dan pengembangan internasional membangun kemitraan untuk perubahan dinegara berkembang.html.

proyek khusus bahkan dikeluarkan dengan anggaran sebesar € 30 juta untuk program pengembangan sektor pendidikan yang sebagian besar dilaksanakan di Somaliland yang merupakan sebuah wilayah otonom di utara Somalia dan menangani semua tingkat pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, pendidikan tinggi, pelatihan guru dan peningkatan kapasitas administrasi pendidikan. Sejauh ini, 31 sekolah baru, 194 fasilitas pencucian dan 30 ruang ramah-gadis telah dibangun dan program rehabilitasi 167 ruang kelas³⁰. Sedangkan pada siklus bantuan tahun 2014-2020 dana yang digelontorkan berjumlah € 286 juta yang berfokus pada 3 sektor: pembangunan negara dan pembangunan perdamaian, keamanan dan ketahanan pangan serta pendidikan³¹.

Selain itu, Somalia juga mendapatkan kepercayaan sebagai penerima manfaat dari Dana Darurat Uni Eropa untuk Afrika, khususnya yang berkaitan dengan upaya pembangunan perdamaian, pengelolaan arus migrasi dan dukungan untuk orang-orang terlantar di Somalia, sertafasilitas bagi pengungsi-pengungsi Somalia yang ingin kembali dari negara tetangga. Dukungan tambahan untuk Somalia disalurkan melalui inisiatif Uni Eropa lainnya, khususnya melalui Instrumen yang berkontribusi untuk stabilitas dan perdamaian, fasilitas perdamaian Afrika, program barang dan tantangan global, instrumen Eropa untuk demokrasi dan hak asasi manusia serta tiga misi kebijakan keamanan dan pertahanan bersama (EUCAP-Nestor, EU Naval Force Atalanta dan Misi Pelatihan Uni Eropa di Somalia). Uni Eropa mengeluarkan biaya kuranglebih sebanyak €215 juta dengan jangka investasi 2008-2013. Uang tersebut antara lain digunakan untuk menolong para pengungsi sebanyak €13 juta, uang bantuan untuk dinas

³⁰*Ibid*

³¹https://en.wikipedia.org/wiki/Budget_of_the_European_Union.html

keamanan Somalia sebanyak €12 juta, bantuan untuk operasi militer yang dilaksanakan Uni Afrika sebanyak €60 juta, serta biaya Operasi Atalanta sebesar €8 juta per tahunnya³².

Setelah disepakati bahwa kekuatan angkatan laut CSDP melalui operasi anti perompakan Atalanta akan diperintahkan dari Northwood (Inggris), menjadi mungkin bagi Uni Eropa untuk mengambil langkah hukum untuk mendirikan operasi dan beralih ke tahap strategis militer akhir dari proses perencanaan. Ketika Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan yang berlangsung pada tanggal 10 November 2008. Dewan Urusan Umum kemudian sepakat untuk membentuk kerangka hukum untuk operasi Atalanta dengan mengadopsi Joint Action 2008/851/CFSP. Dalam aksi bersama mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden, Dewan Sekretariat Jenderal memperkirakan untuk biaya operasional misi Atalanta sekitar € 8.300.000 untuk dua belas bulan pertama sampai tahun 2009. Negara-negara anggota Uni Eropa harus membayar bersama-sama melalui mekanisme Athena yang disepakati oleh Athena Committee. Anggaran ini dibagi berdasarkan GDP setiap Negara yang mencakup pembiayaan umum operasi, seperti biaya untuk operasional Markas di Northwood (UK) dan Markas Angkatan (Onboard Flagship), serta pelayanan medis dan transportasi. Adapun untuk biaya penyediaan aset militer dan personil dibagi dengan negara yang memberikan kontribusi sesuai dengan keterlibatan mereka dalam operasi dengan masing-masing negara menanggung biaya sumber daya asset yang dikerahkan³³.

Beban yang timbul dari penempatan personil dan aset militer dibagikan pada masing-masing negara

³²Op.Cit ec.europa.eu/countries/Somalia.

³³Niklas Novaky. Deploying Military Force Under CSDP: The case of Eu Nav for Atalanta. UACES Annual Conference. 2012. Hal. 28.

dalam membayar biaya sumber daya yang dikerahkan. Jerman misalnya menghitung sekitar € 50 juta untuk tambahan cost melalui partisipasi dalam Operasi Atalanta untuk tahun 2009. Keseluruhan pengeluaran untuk misi diperkirakan sekitar \$ 450 juta per tahun. Anggaran awal yang dikeluarkan Uni Eropa untuk biaya umum Operasi Atalanta adalah sekitar € 8,3 Juta untuk periode 12 bulan pertama hingga Desember 2009. Setelah disepakati perpanjangan misi untuk 2 tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009-2011. Dana masing-masing yang dikeluarkan adalah senilai € 8.400.000 dan € 8.500.000. Sedangkan di tahun 2012 anggaran mencapai € 8.300.000. Pendanaan yang disediakan untuk perpanjangan mandat operasi dari 2012 hingga 2014 adalah € 14.900.000 yang relatif lebih kecil dari dana pertahun yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya³⁴. Hal ini berkaitan dengan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan Uni Eropa dan juga mengingat pada periode ini kesuksesan operasi Atalanta telah cukup efektif mengurangi ancaman perompakan.

Selain dukungan berupa gelontoran dana dalam jumlah besar dari Uni Eropa dalam mengatasi masalah perompakan Somalia melalui operasi Atalanta, dukungan logistik juga dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dan efektivitas Operasi. Selama fase operasional dilakukan, pengaturan identifikasi kemampuan aset dan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan tugas militer untuk tujuan misi harus menyediakan pasokan dan layanan utama yang diperlukan di AAO (Area Of Operation) agar operasi dapat berjalan dengan maksimal. Dukungan logistik berupa transportasi dan kendaraan, aliran dana, ketersediaan fasilitas medis, dan bahan

³⁴Fabian Stoffers. Protecting vital trader routes; The European Union's policy of combat piracy in the Horn of Africa from 2008-2012. Hal. 31.

bakar adalah beberapa prioritas awal yang akan meningkatkan efektivitas operasi³⁵.

Dukungan logistik dalam elemen operasi Atalanta baik yang di daratan maupun di lautan berfungsi untuk memberikan suplay di Area of Operation (AOO) bagi unit yang berpartisipasi melaksanakan mandate Atalanta. Metode utama penyediaan persediaan logistik adalah penggunaan agen koordinasi utama. Pengisian ulang untuk unit yang mengawal WFP dapat dilakukan melalui pengisian di laut yang berasal dari dukungan negara-negara lain seperti Amerika atau pelabuhan terdekat yang direncanakan. Unit yang beroperasi terhubung langsung dengan agen pemasok dan layanan pendukung lainnya oleh daerah markas Forward (FHQSA) multinasional di Djibouti yang juga berfungsi sebagai markas dan pelabuhan utama operasi Atalanta. Selain di Djibouti, pasukan Atalanta juga menjadikan daerah Mombasa Dar es Salaam sebagai tempat pemasok sekunder dalam dukungan logistik pelaksanaan misi³⁶.

Realisasi dukungan fasilitas logistik untuk operasi Atalanta mulai bisa berjalan dengan maksimal setelah empat bulan pertama pelaksanaan misi. Selama periode dua bulan manajemen administrasi layanan dukungan dan pengisian kapal dikelola di bawah proses National Born Cost (NBC) untuk pasukan negara yang berkontribusi (TCN) secara sukarela. Negara-negara yang ingin menggunakan dukungan kapal dan kontrak pengisian (tidak termasuk bahan bakar) perlu dana keuangan sebesar € 155.000 yang dihitung berdasarkan pada biaya rata-rata untuk mengisi ulang sebuah fregat dengan menggunakan fasilitas dukungan pelabuhan yang digunakan Operasi Atalanta sebagai sarana suplay logistik. Namun,

³⁵Op.Cit. Soufis.Hal.17.

³⁶Loc.cit Soufis.

menurut dewan Uni Eropa, TCN tetap memiliki tanggung jawab secara kolektif untuk memberikan dukungan logistik pada elemen yang terlibat dalam Eu Navfor. Ketentuan dukungan sebagian besar diatur dari sumber daya nasional dan kontrak “ad hoc” berdasarkan (EUCOUNCIL, EU CONCEPT 11716/08 untuk CO-OPERASI MILITER SIPIL 2008).

2. Tipologi Masalah

a) Jenis Masalah Tidak Rumit Secara Politik Dan Preferensi Yang Sama Dari Uni Eropa

Pada tanggal 8 Desember 2008 Uni Eropa (EU) melalui Kebijakan Umum Pertahanan dan Keamanan (CSDP) mencapai hasil yang signifikan melahirkan kebijakan baru dalam upaya menanggapi masalah perompakan Somalia yang mengganggu stabilitas keamanan maritim global di Teluk Aden. Peluncuran Operasi EU Navfor (Atalanta) mendapat pujian dari aktor internasional dalam perannya berkontribusi secara serius dalam kampanye masyarakat internasional melawan perompakan dan mensponsori pengawalan bagi konvoi kapal-kapal World Food Programme (WFP) serta melindungi pengiriman rentan lainnya. Eu Navfor juga terbilang sebagai sebuah terobosan kebijakan pertahanan dan keamanan baru dari berbagai misi-misi CSDP sebelumnya. Operasi Atalanta merupakan penyebaran kekuatan angkatan laut pertama Uni Eropa dan menjadi misi operasi militer CSDP pertamakali yang di pimpin oleh Inggris dengan bantuan dukungan dari Perancis dan Yunani sebagai angkatan Headquarters.

Dibandingkan dengan kebanyakan operasi militer CSDP lainnya yang telah diluncurkan sejak tahun 2003. EU Navfor juga dikerahkan dalam waktu yang relatif singkat setelah Uni Eropa menyusun proses perencanaan politik dan strategis untuk operasi. Setelah proses perencanaan diajukan ke dalam Uni Eropa pada bulan Juli, hanya butuh waktu enam bulan saja

sebelum Dewan Umum melalui menteri luar negeri Uni Eropa pada tanggal 8 Desember 2008 menyatakan Eu Navfor mulai beroperasi.

Penulis merasa penting untuk mengetahui tentang mengapa operasi EU Navfor membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam merumuskan dan melaksanakan operasi yang kemudian berjalan cukup efektif dalam kurun waktu yang tak begitu lama sejak operasi diluncurkan. Sebab hal ini mungkin berkaitan dengan upaya Uni Eropadalam mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden melalui Operasi Eu Navfor (Atalanta) yang dilakukan secara kolektif dapat berjalan efektif karena adanya tingkat kolaborasi yang tinggi dari negara-negara Anggota Uni Eropa. Tingkat kolaborasi ini dipengaruhi oleh karakter masalah perompakan yang dihadapi dan kesamaan preferensi aktor yang terlibat untuk mengatasi.

Meskipun dapat mempengaruhi stabilitas keamanan global, namun karakter dari masalah perompakan sendiri belum menjadi agenda-agenda keamanan dominan bagi sebagian besar negara. Hal ini dikarenakan masyarakat internasional memahami hubungan mereka dengan ancaman konvensional kurang dapat menyebabkan penderitaan manusia dan kerusakan materi yang sangat besar seperti kejahatan terorisme. Ancaman perompakan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir seperti yang marak terjadi di teluk Aden dianggap belum menjadi masalah keamanan global yang luar biasa seperti perang nuklir dan ancaman lain yang telah mengorbankan sejumlah besar energi dan sumber daya dari masyarakat internasional. Contohnya seperti intervensi NATO untuk menghentikan pembersihan etnis Serbia di Kosovo pada tahun1999dan intervensi pimpinan AS

untuk memerangi Al Qaeda di Afghanistan setelah serangan teroris 11 September 2001³⁷.

Tipologi persoalan perompakan Somalia yang tak begitu rumit memberi efek positif bagi rezim Uni Eropa dalam upaya mengatasi persoalan ini. Hal ini sangat dimungkinkan, karena karakter masalah tidak mempengaruhi kesepahaman diantara negara-negara anggota Uni Eropa dalam menanggapi masalah perompakan ini untuk segera diatasi. Preferensi yang sama diantara negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa disebabkan oleh kekhawatiran mengenai dampak yang ditimbulkan dari terganggunya perdagangan internasional dan keamanan maritim jalur pelayaran Teluk Aden, serta keamanan negara-negara di seputar kawasan tersebut yang jika dibiarkan tentu juga akan mempengaruhi efek domino negatif yang lebih besar bagi negara-negara Uni Eropa. Langkah preventif militer dalam upaya mengamankan lalu lintas jalur perdagangan laut di Teluk Aden kemudian diambil oleh Uni Eropa dengan inisiasi oleh sekurang-kurangnya enam negara; diantaranya Jerman, Swedia, Portugal, Prancis, Belanda dan juga Inggris yang menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam misi patroli dan pengamanan untuk mengantar kapal-kapal kargo, melindungi kapal komersial, dan mencegah pembajakan³⁸.

Selain itu, masalah perompakan Somalia yang mengancam jalur lalu-lintas maritim dunia termasuk Uni Eropa membuat banyak dari negara anggota Uni Eropa merasa terancam kepentingan nasionalnya, sehingga perlu mengambil sikap secara bersama untuk mengatasi persoalan ini. Prancis dan Inggris misalnya yang merasa terancam dengan semakin maraknya aktivitas perompakan Somalia di Teluk Aden dalam

³⁷Novaky. Op.Cit.Hal.3-4

³⁸<http://nasional.kompas.com/uni.eropa.turun.tangan.atasi.bajak.laut.somalia.html>.

hal keamanan nasionalnya. Peristiwa penyanderaan 22 warga negara Prancis oleh para perompak Somalia dalam insiden Le Ponant pada 4 April 2008 memberi motivasi kuat keterlibatan Prancis dalam mengatasi masalah Perompakan ini³⁹. Sedangkan Inggris yang dikenal telah menjadi rumah bagi sejumlah imigran ekstrimis asal Afrika Timur harus lebih waspada karena adanya indikasi yg kuat dalam keterlibatan organisasi teroris Al-Shabab yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dalam jaringan perompakan di Somalia⁴⁰.

Hal lain dari karakter masalah perompakan yang tak begitu rumit ini yang mendukung tingginya kemungkinan dicapai level kolaborasi kolektif adalah tidak adanya perbedaan asumsi mendasar antar berbagai pihak dalam rezim Uni Eropa yang berpotensi mengakumulasi perpecahan dan menghambat upaya mengatasi permasalahan perompakan Somalia. Dalam mengatasi masalah perompakan Somalia, sebagian negara-negara Uni Eropa memiliki pandangan dan preferensi yang relatif sama sehingga memungkinkan dapat diambil tindakan kolektif secara harmonis dengan koordinasi yang baik. Upaya mengatasi perompak Somalia di Teluk Aden dengan mengerahkan operasi angkatan laut Atalanta secara bersama dapat dilihat sebagai tindakan yang menguntungkan baik bagi kepentingan Uni Eropa sendiri, maupun bagi kawasan regional Tanduk Afrika dan masyarakat internasional. Dengan kehadiran uni Atalanta, maka dimungkinkan untuk menghasilkan barang publik yang relatif murni dalam artian tindakan operasi militer angkatan laut yang dirilis turut berkontribusi terhadap berlangsungnya kampanye masyarakat internasional melawan perompakan Somalia. Kontribusi ini meningkatkan keamanan di rute perdagangan penting dan strategis di Teluk Aden

³⁹Opcit.Novaky.Hal. 15.

⁴⁰*Ibid.*

yang merupakan chokepoint penting bagi perdagangan maritim internasional dan transportasi minyak dari Teluk Persia dan negara-negara Arab. Peningkatan keamanan di Teluk Aden adalah sesuatu yang menguntungkan sebagian besar negara di dunia, terlepas apakah mereka berpartisipasi dalam misi Atalanta atau tidak.

Selain itu, dengan meluncurkan misi Atalanta, negara anggota Uni Eropa diharapkan untuk menghasilkan sejumlah manfaat tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh kontributor sendiri. Seperti Spanyol dan Perancis yang memiliki kepentingan memancing di Samudera Hindia. Dengan demikian, peluncuran Atalanta dapat membantu Prancis berbagi biaya untuk melindungi armada pemancingnya. Selain itu, efek positif lainnya adalah tentang meyakinkan oposisi domestik di Perancis untuk kembalinya Prancis terintegrasi kedalam struktur komando NATO. Dan memungkinkan Jerman untuk terlibat dalam operasi anti-pembajakan tanpa mengubah konstitusinya, serta menegaskan kembali peran tradisional Inggris sebagai kekuatan angkatan laut yang berpengaruh. Operasi Atalanta juga memberikan kontribusi terhadap produksi sejumlah barang klub Eropa terutama yang dapat dinikmati oleh negara-negara Eropa. Dengan membuka jalan baru untuk berkontribusi terhadap kebijakan CSDP yang lebih kuat serta dapat melayani kepentingan negara anggota Uni Eropa lebih efektif di masa depan⁴¹.

b) **Komitmen Besar Uni Eropa Mengatasi Masalah Perompakan Somalia**

Masalah keamanan laut dan perairan internasional merupakan salah satu isu penting dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan jalur perdagangan barang melalui laut sampai saat ini masih sangat

⁴¹Novaky.Op.Cit.Hal.39-40.

berperan penting bagi kelancaran perekonomian global. Sebanyak 80% kebutuhan ekspor dan impor negara-negara didunia menggunakan jalur transportasi maritim. Salah satu jalur lalu-lintas maritim penting dunia di Teluk Aden yang tengah mengalami ancaman keamanan karena maraknya aksi perompakan oleh para bajak laut dari Somalia telah merugikan perdagangan dan berdampak pada terganggunya sistem perekonomian global.

Menanggapi masalah tersebut, dunia internasional kemudian merespon dengan mengambil tindakan berupa kecaman, tindakan hukum dalam bentuk regulasi serta pengerahan oprasi militer dan pengamanan di seputar wilayah perairan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Beberapa negara-negara dan organisasi internasional yang vokal menentang aksi pembajakan antara lain, Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Prancis, NATO dan Uni Eropa⁴².

Uni Eropa sendiri adalah salah satu aktorinternasional yang mengalami kerugian paling besar akibat dari adanya aksi perompak Somalia. Total nilai transaksi perdagangan Uni Eropa yang melewati Teluk Aden mencapai \$557,753 juta. Akibat dari adanya aksi perompak Somalia di Teluk Aden, Uni Eropa mengalami kerugian sampai dengan \$11 miliar yang setara dengan 44% dari total keseluruhan aksi perompak di dunia⁴³.

Aktivitas perompakan di Teluk Aden telah sangat mengganggu kepentingan perdagangan dan ekonomi Uni Eropa yang menggantungkan aktivitas perdagangan maritim baik ke atau dari pelabuhan-pelabuhan negara anggota Uni Eropa Dengan angka 95% dari perdagangan negara-negara anggota Uni Eropa (berdasarkan volume) diangkut melalui laut dan

⁴²DocSlide.Makalah-perompak-somalia.html.

⁴³www.uregon.edu.com.International Expert Group on Piracy off the Somali Coast Report. 2009.

20% dari perdagangan global tersebut melewati daerah strategis Teluk Aden. Negara-negara anggota Uni Eropa seperti Jerman mengalami kerugian paling besar yakni mencapai \$2,5 miliar per tahun akibat dari aksi perompak Somalia, kemudian disusul oleh Inggris yang diperkirakan mengalami kerugian sampai dengan \$1,7 miliar per tahun, negara Perancis diperkirakan mengalami kerugian sekitar \$1,3 miliar per tahun, sedangkan Italia, Spanyol, dan Belgia diperkirakan mengalami kerugian berkisar antara \$700 juta sampai dengan \$1 miliar per tahun⁴⁴. Hal inilah yang membuat Uni Eropa memiliki atensi yang besar untuk secara aktif terlibat dalam mengatasi masalah perompak Somalia di Teluk Aden melalui operasi Atalanta demi melindungi jalur perdagangan yang sangat penting bagi perekonomian Uni Eropa.

Selain melindungi rute perdagangan penting bagi perekonomian, bentuk keprihatinan Uni Eropa terhadap masalah perompakan menjadi salah satu mandat pentingnya dalam operasi Atalanta untuk memberikan bantuan pengawalan militer pada kapal-kapal penyuplai bantuan pangan kemanusiaan WFP di kawasan Tanduk Afrika. Situasi kemiskinan, kemarau berkepanjangan, kelaparan dan konflik antara klan yang melanda negara Somalia telah mengakibatkan Somalia menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia dengan masalah kemanusiaan yang buruk. Kondisi kemanusiaan yang buruk membuat negara ini memerlukan suplay bantuan kemanusiaan dari WFP yang membawa pangan untuk sekitar 3,2 juta warga Somalia, dimana 43% dari populasi tergantung pada bantuan pangan. Sekitar 95% dari bantuan internasional yang disediakan ke Somalia dikirimkan melalui jalur laut. Kapal-kapal *World Food*

⁴⁴www.uregon.edu.com. International Expert Group on Piracy off the Somali Coast Report. 2009.

Programme (WFP) mengangkut 30.000 sampai 40.000 metrik ton bantuan pangan per bulan untuk Somalia⁴⁵. Beberapa negara anggota Uni Eropa sebelumnya telah lebih dahulu berkontribusi dalam menangani bencana kemanusiaan yang melanda Somalia. Tak kurang dari Inggris, Prancis dan Jerman yang cukup serius menganggapi masalah ini.

Meskipun belum tergolong dalam agenda masalah keamanan dominan secara politik dalam mayoritas aktor internasional, namun masalah perompakan Somalia memiliki kompleksitas multi- dimensionalnya sendiri. Perompakan Somalia yang melakukan aksi di laut sebenarnya adalah akar dari tindakan kriminal yang berasal dari darat. Perompakan direncanakan serta diorganisir dari darat dan menjadi mudah berkembang kearah aktivitas bisnis kejahatan yang berbahaya karena lemahnya otoritas kekuasaan pemerintahan di negara Somalia. Oleh karena itu, dalam mengatasi akar masalah perompakan Somalia, Uni Eropa memberikan atensi dan dukungan yang besar pada upaya pembangunan kapasitas keamanan maritim kawasan Tanduk Afrika dengan pembangunan institusi atau kelembagaan pemerintahan negara kawasan, khususnya Somalia yang menjadi basis pergerakan kelompok perompak. Pendekatan konferhensi Uni Eropa dilakukan sebagai bentuk komitmen menyeluruh dan terintegrasi dengan berbagai misi dan badan internasional lainnya. Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan, diplomasi, bantuan teknis dan sarana prasarana, pembangunan keamanan kawasan, serta berbagai program terkait stabilitas dan pemulihan Somalia.

Untuk mengimplementasikan kerangka kerja strategis di Somalia Uni Eropa mengambil langkah-langkah substansial melalui dialog politik dan keterlibatan aktif dalam berbagai Misi Kebijakan

⁴⁵ Op.Cit. 9 Maritime_piracy Hal. 196

Pertahanan dan Keamanan Bersama (CSDP) ataupun dengan bantuan kerjasama pembangunan. Operasi anti perompakan (Eu Navfor), Misi pelatihan militer Uni Eropa (EUTM) dan proyek pembangunan polisi maritim Somalia (EUCAP), serta program-program Uni Eropa lain yang didanai dibawah instrumen yang berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian (IcSP), Program rute maritim kritis (CMR) dan dana pembangunan Eropa dalam program keamanan maritim regional (MASE) merupakan serangkaian kegiatan pendekatan terpadu Uni Eropa untuk Somalia. Berbagai misi terkait juga dilakukan dengan kersama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional kawasan termasuk diantaranya PBB khususnya dalam Misi UN-Somalia, UNODC, UNDP, Misi Uni Afrika (AMISOM), *Intergovernmental Authority Development*(IAGD), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan beberapa LSM dibawah koordinasi *Oceans Beyond Piracy* (OBP)⁴⁶.

3. Pembangunan Kerjasama Internasional

Dalam mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden aktor-aktor negara dan organisasi internasional yang terlibat penting untuk melakukan kerjasama dan koordinasi. Mengingat kondisi negara Somalia yang dirundung instabilitas politik dan pemerintahan kemudian berdampak negatif terhadap situasi dan stabilitas keamanan di kawasan perairan Teluk Aden. Potensi ancaman keamanan yang ditimbulkan dari aksi perompakan tidak hanya dalam skala nasional dan regional, namun juga dalam tataran internasional dan memerlukan pemecahan persoalan secara bersama melalui kerjasama berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Uni Eropa yang menunjukkan peranannya dalam Operasi EU Navfor. Sebab masalah perompakan ini merupakan problem

⁴⁶<https://www.eucapsom.eu/pendekatankomprehensifUniEropakeTandukAfrika/fact-sheet/April2018.html>.

multidimensi yang berpengaruh luas dalam hubungan internasional dan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh negara Somalia sendiri. Kompleksitas masalah yang dihadapi melebihi kapasitas sebagian besar individu negara dan karenanya harus ditangani dengan operasi multinasional dan kerjasama yang efektif. Kehadiran berbagai gugus satuan tugas anti perompakan seperti NATO, CTF-150 dari Amerika, Rusia, India, China, Jepang, Malaysia, dan lain-lain dengan mandat masing-masing tentu semakin menambah kekuatan yang diperlukan dalam upaya mengatasi ancaman perompakan Somalia dan akan lebih mudah mencapai kepentingan keamanan maritim bersama. Konsep *cooperative Security* dapat menjadi jalan pemecahan dalam mengatasi masalah perompakan di Teluk Aden. Adanya pembangunan kerjasama dari berbagai aktor-aktor internasional terkait yang berkepentingan dalam diharapkan dapat mempermudah penanganan masalah perompakan yang berkembang secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, Kerjasama keamanan yang kooperatif perlu dilakukan tidak hanya dalam tataran operasi militer, namun juga berkesinambungan dengan upaya non-militer penanggulangan kejahatan transnasional yang mencakup tindakan perompakan, seperti pembangunan instabilitas politik, ekonomi, hukum dan keamanan

a) Sektor Keamanan

Stabilitas keamanan yang terganggu di wilayah perairan Teluk Aden akibat maraknya aksi perompakan dari para bajak laut Somalia telah mengancam arus perdagangan global dan menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi para pelaut yang menggunakan jalur maritim ini sebagai penghubung antara Asia-Eropa. Ketidamampuan otoritas pemerintah negara Somalia yang dirundung masalah multidimensional mulai dari lemahnya kekuatan pemerintahan hingga krisis kemanusiaan mengakibatkan aktivitas perompakan yang dilakukan oleh para perompak dari Somalia semakin marak. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah perompakan Somalia diperlukan

bantuan dan dukungan dari aktor internasional lain yang berkepentingan dalam persoalan ini.

Kehadiran berbagai kekuatan angkatan laut internasional dari berbagai negara dan organisasi internasional sebagai kampanye internasional untuk mengatasi masalah perompakan Somalia selama dekade terakhir telah menunjukkan adanya perhatian yang cukup serius dalam melihat situasi keamanan di Wilayah lalu-lintas maritim Teluk Aden. Operasi Eu Navfor atau yang bisa dikenal dengan misi Atalanta untuk mengatasimasalah perompakan Somalia di Teluk Aden dan perairan lepas pantai Somalia merupakan bagian dari pendekatan komperhensif Uni Afrika di wilayah Tanduk Afrika (HoA). Adapun tujuan politik Uni Eropa dalam operasi ini adalah sebagai upaya untuk mencegah aksi perompakan yang mengganggu perdagangan global dan mewujudkan keamanan maritim. Uni Eropa membangun upaya kerjasama dari berbagai aktor lain yang juga memiliki kepentingan dan persepsi yang sama terhadap keamanan maritim di wilayah ini.

Dalam mewujudkan tujuan keamanan maritim tersebut, Operasi Eu Navfor menginisiasi pembentukan Maritime Security Center–Horn of Africa (MSC-HOA) dengan kerjasama erat dengan industri kemaritiman. MSCHOA didirikan sebagai upaya untuk melindungi perdagangan yang melalui Area beresiko tinggi pembajakan (HRA). MSC-HOA terletak di ruang operasi Operation Head Quarters (OHQ) yang menyediakan pemantauan 24 jam terhadap kapal-kapal yang transit melalui TelukAden. MSCHOA sebagai Pusat pemantauan keamanan maritim Eu Navfor memainkan peran penting dalam mengoptimalkan koordinasi yang tidak berbenturan antara semua gugus tugas kekuatan angkatan laut yang dikerahkan dari berbagai negara dalam upaya kontra ancaman perompakan di kawasan Tanduk Afrika.

Penyediaan situs web interaktif MSCHOA memungkinkan untuk dapat dilakukan komunikasi

mengenai pemantauan situasi dan informasi lebih lanjut dari kapal-kapal yang melintas yang pergerakannya dipantau oleh Operasi Eu Navfor dan satuan lainnya yang tergabung dalam asosiasi berdasarkan aset yang tersedia yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam keadaan darurat. Selain itu, Eu Navfor bekerjasama dan mendorong industri perkapalan untuk mengikuti pedoman "Best Management Practices for Protections Against Somalia Based Piracy" (BMP4) yang berisi panduan peningkatan keamanan dalam upaya mengurangi resiko pembajakan pada setiap kapal yang melintas di Area Beresiko Tinggi. BMP4 bertujuan untuk membantu kapal-kapal menghindari, mencegah, atau menunda serangan perompak di lepas pantai Somalia, termasuk kawasan Teluk Aden dan Laut Arab. Meskipun tidak semua pedoman dalam BMP4 ini dapat diterapkan pada semua jenis kapal. Sebab dalam membuat Risk Assessment perlu ditentukan pedoman mana yang dapat diterapkan untuk masing-masing kapal. Namun pengalaman yang didukung oleh data menunjukkan kapal-kapal yang menerapkan rekomendasi dalam BMP4 secara signifikan dapat mencegah kapal tersebut menjadi korban perompakan.

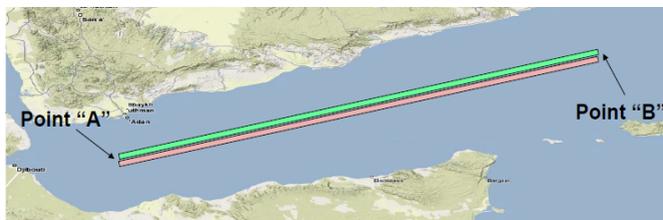
Inisiatif lainnya dalam misi Atalanta yang bekerjasama dengan koalisi angkatan laut internasional dari berbagai negara yang melaksanakan patroli di wilayah Teluk Aden adalah pengenalan dan pengelompokan koridor transit bersama bagi kapal-kapal yang menggunakan jalur lalu-lintas maritim Teluk Aden melalui IRTC. Pengelompokan transit dirancang berdasarkan analisis dari pergerakan para perompak di Seputar Teluk Aden. Analisis serangan bajak laut yang dilakukan menunjukkan bahwa serangan perompakan selama kegelapan jarang terjadi dan memiliki tingkat keberhasilannya di wilayah koridor yang ditetapkan oleh IRTC. Dengan asumsi demikian, maka perjalanan konvoi kapal-kapal yang melintas di area beresiko tinggi telah diatur berdasarkan pertimbangan zona waktu dan titik jalur perjalannya serta kecepatannya yang mesti ditempuh oleh setiap kelompok kapal untuk memastikan bahwa kapal

berkumpul selama tahap kritis transit daerah yang paling rentan di malam hari⁴⁷. Meskipun berpartisipasi dalam Grup Transit, setiap kapal harus tetap menggunakan semua langkah keamanan yang diperlukan guna mencegah pembajakan⁴⁸.

Pendaftaran awal kapal, pembaharuan posisi dan kecepatan kapal serta konfirmasi final kondisi kapal saat melewati Area Beresiko tinggi pembajakan di seputar Teluk Aden juga harus dilaporkan melalui *Operasi perdagangan laut kerajaan Inggris* (UKMTO) yang bertindak sebagai jembatan informasi antara perdagangan maritim internasional dan pasukan keamanan, sehingga memungkinkan kekutan militer untuk memposisikan aset terbaik di area tertentu untuk mencegah dan melindungi kapal terhadap ancaman aksi perompakan⁴⁹.

Tabel 4.4: Koridor Pengelompokan Transit

Speed (SOG/GPS)	Eastbound Transit		Westbound Transit	
	Entry Point "A"		Entry Point "B"	
10 kts	01:00 (Z)	04:00 (Lt)	15:00 (Z)	18:00 (Lt)
12 kts	05:30 (Z)	08:30 (Lt)	21:00 (Z)	00:01 (Lt)
14 kts	08:30 (Z)	11:30 (Lt)	01:00 (Z)	04:00 (Lt)
16 kts	11:00 (Z)	14:00 (Lt)	05:30 (Z)	08:30 (Lt)
18 kts	13:00 (Z)	16:00 (Lt)	07:00 (Z)	10:00 (Lt)



All illustrations & distances are approximate

(Sumber : Eu Navfor Somalia)

⁴⁷Gulf of Aden Internationally Recommended Transit Corridor & Group Transit Explanation.pdf.march.2009.Hal.4.

⁴⁸Ibid.Hal.12

⁴⁹Capt Rajeev Jassal.Guide to transit through the Gulf of Aden and limit Somalia.MySeaTime.26November 2017.html

Selain melakukan upaya pencegahan terhadap aksi perompakan melalui patroli keamanan dan pemetaan serta mengkoordinasikan jalur lalu-lintas maritim bagi kapal-kapal yang melintas di wilayah beresiko tinggi Teluk Aden, Uni Eropa turut berkontribusi padasolusi jangka panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi pembajakanmelalui pembangunan kapasitas kekuatan maritim negara-negara di wilayah seputar Tanduk Afrikatermasuk Somalia agar mampu mengambil peran lebih dalam memerangi masalah perompakan di negaranya.

Instrumen lain yang digunakan Uni Eropa yaitu dengan merilis Misi baru melalui misi pelatihan militer di Somalia (EUTM Somalia). Pada 10 April 2010 yang bekerjasama dan berkoordinasi erat dengan berbagai mitra internasional lainnya, diantaranya bersama PBB, Departemen Luar Negeri AS dan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM)⁵⁰. Dengan mandat untuk mendukung Transisional Federal Government (TFG) dan membantu memperkuat lembaga-lembaga nasional. Misi ini menyediakan saran dan bimbingan militer pada tingkat politik dan strategis kepada otoritasSomalia didalam lembaga-lembaga pertahanan, serta memberikan monitoring khusus, saran, pelatihan yang di perlukan dan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas Tentara Nasional Somalia (SNA)⁵¹. Awalnya pelatihan militer Somalia berlangsung di Kampala dengan kerjasama Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda (UPDF) karena situasi keamanan dalam negeri yang tidak stabil. Namun dalam beberapa bulan pertama tahun 2014, markas misi secara resmi dialihkan ke Somalia dengan 3.600 personil tentara nasional yang telah dilatih pada penghujung tahun⁵². Sejauh ini, EUTM berhasil mengembangkan kapasitas keamanan Somalia dengan menghasilkan lebih dari 5.700 prajurit somalia terlatih, 4 satuan batalion infantri, beserta

⁵⁰"Deskripsi misi". *EUTM Somalia*. 2014

⁵¹[https://www.eutm-somalia.eu/Mandate and Objectives](https://www.eutm-somalia.eu/Mandate%20and%20Objectives). 2016.

⁵²<http://sabahionline.com>"Program pelatihan militer Uni Eropa diluncurkan di Somalia". 26 Februari. 2014.

29 staf departemen pertahanan dan staf umum Tentara Nasional Somalia⁵³.

Pada 14 November 2011 di Brussel, Uni Eropa mengadopsi sebuah "Kerangka Kerja Strategis untuk Tanduk Afrika" yang terangkum dalam Kesimpulan Dewan Uni Eropa di Tanduk Afrika (16858/11). Langkah ini sebagai sarana untuk memandu keterlibatan multisektor Uni Eropa di kawasan ini. Dokumen tersebut menetapkan cara Uni Eropa melaksanakan pendekatan strategisnya dalam bekerja dengan kemitraan lain khususnya Uni Afrika dan mitra internasional utama di kawasan itu sendiri. Prioritas keamanan tindakan Uni Eropa dalam hal ini bertujuan untuk membangun struktur politik yang kuat dan bertanggung jawab, berkontribusi terhadap resolusi dan pencegahan konflik, mengurangi ancaman keamanan yang berasal dari kawasan⁵⁴.

Keterlibatan Uni Eropa di Tanduk Afrika tak bisa dilepaskan dari kepentingan geo-strategis dari keinginan Uni Eropa untuk membantu memperbaiki kemiskinan dengan upayamenumbuhkan ekonomi mandiri serta kebutuhan Uni Eropa untuk melindungi warga negaranya sendiri dari ancaman keamanan. Untuk mengoordinasikan kerangka kebijakan tersebut, di tahun 2012 Uni Eropa membentuk Perwakilan Khusus untuk Tanduk Afrika dan menunjuk Alexander Rondos untuk ditugasi sebagai ketua perwakilan khusus. Adapun fokus Alexander Rondos tertuju pada Somalia dan dimensi regional dari konflik yang terjadi, begitupun dengan masalah perompakan yang merupakan salah satu akar penyebab ketidakstabilan di Somalia⁵⁵.

Secara substansial Uni Eropa membangun kerjasama keamanan bersama Uni Afrika melalui misi militer di Somalia (AMISOM). Uni Eropa memfasilitasi dukungan teknisdengan berkontribusi dalam pengawalan pengiriman

⁵³ Op.Cit.eutm-somalia.eu.2016

⁵⁴https://eeas.europa.eu/headquarters/homepage/428/fight-against-piracy_html.

⁵⁵https://eeas.europa.eu/headquarters-homepage_en/428/Fightagainstpiracy,

supplylogistik untuk misi perdamaian AMISOM melalui misi Atalanta. Terdapat 128 konvoi kapal pendukung misi AMISOM selama kurun waktu 6 tahun sejak dirilis berhasil dilindungi oleh pasukan angkatan laut Uni Eropa dalam operasi kontra perompakan. Sedangkan dalam segi keuangan, kontribusi besar Uni Eropa untuk AMISOM telah digelontorkansejak tahun 2007 melalui fasilitas Perdamaian Afrika (APF) dengannilai total € 325.000.000 yang menjadikan Uni Eropa sebagai sponsor utama terhadap misi militer dan kemanan Uni Afrika di Somalia. AMISOM mendukung dialog dan rekonsiliasi dan memberikan perlindungan kepada infrastruktur kunci seperti gedung-gedung pemerintah dan Bandara internasional Mogadishu guna mengaktifkan peran Pemerintah Transisi dan Lembaga federal untuk melaksanakan fungsinya. Dukungan finansial melalui tambahan pendanaan juga ditawarkan Uni Eropa sebesar €67.000.000 untuk biaya Tunjangan misi, perawatan medis, akomodasi, logistik, dan peralatan komunikasi⁵⁶.

Uni Eropa juga merupakan sponsor utama baik secara finansial maupun perencanaan dan pengembangan kapasitas dalam misi penjaga perdamaian Uni Afrika di Somalia (AMISOM). Sejak diluncurkan pada tahun 2007 Uni Eropa telah mendanai AMISOM melalui Fasilitas Perdamaian Afrika (APF). Sebanyak €13 juta diperuntukkan untuk mendukung lingkungan yang bebas dari ancaman ledakan dan €1,3 juta untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merancang serta melaksanakan kegiatan nyata di wilayah baru yang dapat diakses di Somalia selatandan tengah.

b) Sektor Hukum

Dalam melaksanakan misi mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden, Uni Eropa memerlukan dasar hukum yang jelas untuk membantu satuan operasi Eu Navfor dalam pelaksanaan tugas

⁵⁶www.eunavfor.eu.AComprehensiveEuropeanApproach:operation_Atalanta. 2012.Pdf. Hal. 7.

berdasarkan acuan dari hukum internasional yang berlaku. Ketentuan mengenai dasar hukum di dapatkan dari Keputusan oleh Dewan Uni Eropa sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) yang relevan seperti resolusi 1814, 1816, 1838, 1846, dan 1851 yang diadopsi sejak 2008 yang berkaitan dengan fokus PBB dalam menangani perompak secara umum dan perompak Somalia secara khusus,serta sebagai bentuk perwujudandalam pengamanan wilayah maritim.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, misi Atalanta tidak hanya berfokus pada perang melawan perompakan atau konflik bersenjata. Namun dapat meningkatkan upaya dalam penegakan hukum dengan berdasarkan hukum laut dan hukum kebiasaan internasional, Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) dan Convention Against the Law. Laksamana Muda Hudson sebagai Komandan Oprasional pada tahun 2012 meyakinkan bahwa Atalanta memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk mengganggu, menghalangi dan menangkap bajak laut dan mengatakan bahwa prinsip penerapan kekuatan adalah sebagai hal yang wajar dengan tetap memperhatikan batasan terhadap ancaman yang diterima dalam pelaksanaan misi.

Adapun dasar hukum tersebut dapat digunakan oleh unit Atalanta dalam melaksanakan misi, termasuk dalam hal untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan juga upaya transfer orang yang terindikasi berniat atau yang berupaya melakukan tindakan perompakan bersenjata dilaut. Selain itu, segala aset dan property yang dimiliki para perompak dapat direbut dan diamankan oleh para unit operasi, begitupundengan kapal-kapal yang ditahan oleh perompak.Bahkan pada tahun 2012 serangan langsung kedarat untuk menghancurkan barak-barak dan pos perompakan atau menahan perompak diperbolehkan sejauh radius 2 kilometer dari pantai.

Personel militer Atalanta dapat menangkap, menahan dan mentransfer orang-orang yang dicurigai melakukan atau yang telah melakukan tindakan pembajakan atau

perampokan bersenjata di daerah-daerah di mana mereka berada. Mereka dapat merebut kapal perompak atau kapal yang ditangkap setelah tindakan pembajakan atau perampokan bersenjata dan yang berada di tangan para perompak, serta barang-barang di atas kapal. Penangkapan dan penuntutan tersangka pembajakan dapat dilakukan dengan mekanisme hukum yang dimungkinkan dengan tetap memperhatikan standar hak asasi manusia untuk dipenuhi dalam pemindahan, penuntutan, dan penahanan terhadap para perompak yang dicurigai dan dihukum.

Uni Eropa membangun kerjasama dengan UNDP dan instansi lainnya terkait kejahatan transnasional berupa perompakan, terorisme, peredaran narkoba dan lain-lain. Kerja sama internasional yudisial untuk mengakhiri impunitas sangat diperlukan sebagai komponen kunci dari keseluruhan perjuangan melawan perompakan. Saat ini transfer para tersangka untuk persidangan dari asset kapal EU Navfor ke negara-negara Anggota atau daerah Negara-negara yang dapat dilakukan untuk diadili berdasarkan undang-undang anti-bajak laut. Uni Eropa memberikan kontribusi keuangan terbesar untuk upaya program kontra pembajakan. Program gabungan EU/UNODC yang mendukung pembangunan sistem peradilan Kenya, Seychelles dan Mauritius diluncurkan untuk memberikan bantuan praktis guna mengakomodir tambahan tuntutan terhadap tersangka perompak⁵⁷.

Melalui kerjasama dengan negara lain yang memiliki otoritas terkait hal ini seperti Kenya dan Seychelles. Para tersangka dapat dituntut oleh Negara Anggota Uni Eropa atau oleh Kenya di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada tanggal 6 Maret 2009 yang memberi hak kepada pihak berwenang Kenya untuk mengadili. Sebuah Memorandum of Understanding (MoU) juga disepakati antara Uni Eropa dan Republik Seychelles pada 30 Oktober 2009 yang memungkinkan transfer bajak

⁵⁷EU-Naval-Force-Operation-Atalanta-Information-Booklet-ENhyperlinks.pdf. Hal.15.

laut yang dicurigai dan perompak bersenjata yang ditangkap oleh satuan Atalanta di wilayah operasi. Pengaturan ini merupakan kontribusi baru yang penting untuk upaya kontra-perompakan. Negosiasi terbuka lainnya dengan negara-negara di kawasan Tanduk Afrika seperti Mauritius, Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania dan Uganda pada tahun 2011-2012 juga dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan perjanjian transfer lebih lanjut dan sejauh ini menghasilkan kesepakatan yang cukup baik⁵⁸.

Sebagai negara di mana para perompak berasal dan beroperasi, negara-negara kawasan Tanduk Afrika yang membangun kerjasama dalam bidang penegakan hukum bagi para tersangka perompakan yang ditangkap tentu memiliki kapasitas terbatas untuk melakukan penuntutan. Oleh karenanya membutuhkan dukungan dari komunitas internasional yang berkepentingan dalam hal ini. Uni Eropa sebagai pionir utama dalam upaya mengatasi perompakan Somalia telah menyediakan beberapa bantuan keuangan untuk memungkinkan beberapa negara seperti Kenya dan Seychelles untuk membangun kapasitas mereka. Dukungan biaya pembangunan peradilan pembajakan diperkirakan sekitar US \$ 31 juta pada tahun 2010 sementara, pada tahun 2012, biaya penuntutan dan penjara diperkirakan mencapai US \$ 14,89 juta. Rincian biaya ini menunjukkan bahwa biaya penuntutan menurun 24 persen pada tahun 2012, sementara pemenjaraan meningkat 26,7 persen. Pengurangan dalam biaya penuntutan tampaknya hampir seluruhnya disebabkan oleh penurunan jumlah tersangka yang dituntut, sementara peningkatan dalam biaya pemenjaraan mencerminkan penahanan jangka panjang para perompak. Pada awal 2013, lebih dari 1.000 tersangka dilaporkan menunggu penuntutan di sekitar 20 negara. Pada tanggal 22 Maret 2010 Perwakilan Tinggi Dewan Uni Eropa Baroness Ashton dari Upholland ke Baroness Kinnock dari Holyhead mengatakan bahwa ada 117 perompak di penjara Kenya, 75 di antaranya dipindahkan

⁵⁸ *Ibid*

oleh Atalanta untuk dituntut. Lebih lanjut 11 tersangka bajak laut akan dipindahkan ke Seychelles oleh Atalanta untuk penuntutan. Dalam 4 tahun pelaksanaan penindakan hukum bagi perompakan hingga februari 2012, tercatat sekitar 1.000 orang telah ditangkap dan menjalani proses hukum di 21 negara⁵⁹.

Pembajakan harus dipahami sebagai aktivitas kriminal terorganisir yang marak terjadi di laut. Namun demikian, inti dari perencanaan dan penyelenggaraan aktivitas perompakan tetaplah berpusat didarat dengan sindikat-sindikat yang bekerja sistematis dan mudah untuk berkembang menjadi bisnis kriminal yang berbahaya karena lemahnya otoritas penegakan hukum negara Somalia dalam menangani masalah ini. Untuk membantu Somalia mengatasi masalah perompakan, Rezim Uni Eropa melalui Misi Atalanta telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan interagency, dengan melibatkan kerjasama dari pihak perusahaan pemilik kapal, operator, British Chamber of Shipping dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Pendekatan tersebut adalah kunci untuk mengatasi masalah pembajakan yang termuat dalam beberapa pendekatan Komprehensif Uni Eropa untuk Somalia.

Salah satu pendekatan yang dilakukan sebagai bagian dari misi pembangunan kapasitas keamanan maritim sipil dan penegakan hukum maritim secara lebih efektif di Somalia, Uni Eropa melalui CSDP kembali meluncurkan misi khusus EUCAP-Somalia pada bulan Juli 2012 yang sebelumnya bernama EUCAP-Nestor. Personil dalam Misi ini ditempatkan di kantor pusat misi di Mogadishu dan di kantor lapangan Hergesia (Somaliland) dan Garowe (Puntland) sambil mempertahankan kantor administrasi di Nairobi⁶⁰.

⁵⁹http://www.bbc.com/news/world-middle-east-Mencari_perompak_somalia_dari_udara.21-2-2012.html.

⁶⁰<https://www.eucap-som.eu/kebijakanumumdankebijakanpertahanan/factsheet/April2018.html>.

Misi berkontribusi pada ketahanan dan pengembangan kapasitas dari kemampuan penegakan hukum sipil federal dan regional maritim dibawah kendali lokal. Adapun tujuan utamanya adalah sebagai pemberi nasehat bagi otoritas federal dan regional Somalia dalam pengembangan penjaga pantai dan fungsi kepolisian maritim zona pesisir di darat dan dilaut. Misi menyediakan saran tingkat strategis, pendampingan dan beberapa pelatihan khusus yang mencakup segi kemanan dan aturan hukum khusus seperti kerjasama polisi dan penyusunan undang-undang kemaritiman guna mendukung fokus dalam pengembangan arsitektur kemanan maritim yang kuat dan berkelanjutan⁶¹.

Adapun kegiatan operasional misi berfokus pada penyediaan dukungan untuk pembangunan dan implementasi kerangka kebijakan penegakan hukum, legislatif dan kelembagaan sipil maritim. Disamping itu, terdapat juga kegiatan pengembangan kapasitas dalam lembaga penegak hukum maritim sipil, peradilan dan kejaksaan. Mitra utama EUCAP Somalia adalah satuan polisi maritim Somalia (SPF MPU) di Mogadishu, penjaga pantai Somaliland dan Polisi pelabuhan Bosasso, serta kementerian dalam negeri, departemen perikanan, kantor jaksa agung, polisi, jaksa dan hakim di tingkat federal maupun wilayah negara bagian. Misi ini juga mendukung mekanisme keamanan maritim Somalia yang strategis, terutama Komite Koordinasi Maritim Nasional (NMCC) dan Koordinasi Keamanan Maritim (MSCC). Saran strategisnya dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan yang dilengkapi dengan koordinasi dan fasilitas pelatihan oprasional khusus yang disediakan oleh mitra kersama lainn seperti PBB melalui UNODC dan unit kelautan AMISOM. Selanjutnya koordinasi dan kerjasama erat dibangun dengan instrumen Uni Eropa lainnya beserta mitra internasional untuk merespon lebih efektif terhadap

⁶¹*Ibid*

prioritas penanganan masalah Somalia dan mendukung pelaksanaan strategi maritim nasional yang komprehensif⁶².

EUCAP Somalia juga membantu kantor keamanan nasional pemerintah federal dalam mengembangkan opsi strategis model penjaga pantai federal dan rancangan rencana keamanan maritim nasional sebagai bagian dari implementasi aspek keamanan maritim Somalia dan kebijakan keamanan nasional. Dalam sektor hukum, dukungan pengembangan diberikan pada rancangan undang-undang penjagaan pantai Somaliland, sebagai bentuk kerjasama antara hakim, polisi dan jaksa dalam menangani kejahatan maritim dan memperkuat rantai peradilan pidana maritim serta mengorganisir latihan penyusunan hukum. Dalam koordinasi erat dengan mitra terkait, instrumen policy Uni Eropa melalui EUCAP turut memfasilitasi partisipasi MPU Somalia dalam latihan maritim internasional di kawasan Tanduk Afrika (CUTLASS Express). Melalui proyek yang dibiayai EUCAP, platform permanen untuk harmonisasi, peninjauan dan evaluasi kursus pelatihan dan kurikulum kepolisian maritim diberikan sebagai dukungan pada Badan Pengembangan Profesional Polisi (PPDB) di Mogadishu seperti perbaharuan ruang kelas di akademi kepolisian untuk menciptakan lingkungan pembelajaran moderen. Kerjasama bersama dengan misi bantuan PBB untuk Somalia (UNSOM) dan instrumen Uni Eropa lain, khususnya EU Navfor yang berfokus pada upaya mengatasi perompakan Somalia, diadakan kegiatan seminar keamanan maritim di beberapa kapal operasi Atalanta di pelabuhan Berbera. Selain itu, kerjasama pertukaran informasi dengan Interpol dilakukan guna mengumpulkan data yang relevan tentang perompakan yang berbasis di Somalia⁶³.

⁶²<https://www.eucap-som.eu/mandatdankegiatan/fact-sheet/April2018.html>.

⁶³Angela Caramerli, Zoe Caselli, Pendekatan Komprehensif Uni Eropa tentang Pembajakan Somalia. *Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales*, Vol 8, No. 1 (2015)

c) Sektor Politik

Dari sekian banyak satuan gugus tugas yang di deploy oleh berbagai Negara dan organisasi internasional yang berkepentingan untuk mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden. Operasi Atalanta yang diluncurkan Uni Eropa memiliki dukungan berbagai instrument politik yang kuat untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan aktor internasional lainnya yang lebih mengedepankan instrument kekuatan militer seperti NATO atau Amerika Serikat. Uni Eropa dianggap memiliki keuntungan untuk mampu mengadakan perjanjian politik dengan Negara-negara di kawasan Tanduk Afrika baik dilakukan secara Government to Government dari Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa ataupun melalui entitas kolektif organisasi Uni Eropa sendiri. Uni Eropa misalnya telah menempatkan status perjanjian pasukan dengan negara-negara di kawasan Tanduk Afrikayang berfungsi sebagai "pengganda kekuatan". Operasi Atalanta yang bermarkas dari Djibouti dan Oman merupakan bukti instrument politik yang kuat dari Uni Eropa dalam hal ini.

Upaya Uni Eropa melalui Operasi Atalanta dalam mengatasi masalah perompakan Somalia di Teluk Aden berjalan efektif dikarenakan adanya instrument politik yang cukup kuat yang difokuskan Uni Eropa dalam berbagai sektoryang merupakan bagian dari pendekatan konferhensif Uni Eropa pada kawasan Tanduk Afrika, khususnya untuk Somalia yang mendapat perhatian khusus. Pendekatan ini termuat dalam Adopsi kerangka kebijakan Strategis untuk kawasan Tanduk Afrika yang membuka peluang baru untuk keterlibatan yang lebih luas dan menyeluruh bagi Uni Eropa di wilayah tersebut. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya melakukan berbagai kegiatan di kawasan ini, mulai dari operasi kemanusiaan hingga pembangunan kapasitas lembaga-lembaga regional, misi anti-pembajakan dan pelatihan militer. Dengan memberikan serangkaian prinsip yang menyeluruh untuk keterlibatanEropa,Kerangka Strategis ini menawarkan

potensi dampak gabungan dari negara-negara anggota dan lembaga-lembaga Uni Eropa untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan-tujuan Uni Eropa di kawasan tersebut.

Prospek tindakan yang lebih koheren menawarkan peluang bagi Uni Eropa untuk diakui di kawasan Tanduk Afrika sebagai aktor yang memiliki kapasitas dan dengan pengaruh yang dihasilkan oleh investasi Uni Eropa sendiri. Melalui penunjukan perwakilan khusus (EUSR) untuk Tanduk Afrika, Uni Eropa memiliki potensi untuk berbicara lebih jelas dengan satu suara di wilayah tersebut. Dengan melakukan hal itu, Uni Eropa akan dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya secara lebih lengkap di kawasan ini: sebagai sebuah blok kekuatan politik dan mitra dagang yang penting, serta sebagai salah satu sumber bantuan dan investasi paling signifikan bagi negara-negara di kawasan ini⁶⁴.

Dalam hal bantuan ke Somalia, sebagai salah satu fokus perhatian Uni Eropa di Kawasan Tanduk Afrika, upaya yang dilakukan dikoordinasikan erat melalui dialog politik Uni Eropa yang berlangsung terus dengan Pemerintah Federal dan administrasi lain di Somalia dan kerjasama dalam kontra-pembajakan adalah bagian penting dari dialog yang berlangsung. Sebab bagaimanapun, masalah perompakan sebenarnya adalah masalah yang berasal dari darat akibat lemahnya kemampuan Negara Somalia karna instabilitas politik yang dialami.

Adapun Tujuan politik Uni Eropa untuk membantu Somalia adalah untuk menjadikan kembali Somalia sebagai negara yang damai, stabil dan demokratis, sambil menangani pembajakan dan kejahatan internasional lainnya. Kerja Uni Eropa di bidang ini dipandu oleh prinsip-prinsip proses kesepakatan baru dalam Somalia Compact dan oleh Pendekatan Komprehensif Uni Eropa sebagai bagian dari kerangka Rencana Aksi Regional

⁶⁴<http://piracy-studies.org>. Uni Eropa dan Somalia-Pembajakan Kontra dan Pertanyaan tentang Pendekatan Komprehensif _Studi piracy_files/.css.

Tanduk Afrika yang berusaha untuk: Mencapai pemerintahan Federal Somalia yang stabil dan damai melalui proses politik yang inklusif di berbagai tingkat melalui rekonsiliasi dan membantu dalam pembentukan lembaga keamanan federal Somalia yang bertanggung jawab dan memberikan keamanan dasar bagi warga negaranya. Tonggak-tonggak politik ini adalah dasar untuk menciptakan fondasi bagi perdamaian dan pemulihan Somalia⁶⁵.

Untuk membantu mencapai tujuan ini, Uni Eropa melalui Program Indikatif Nasional menyediakan bantuan keuangan senilai € 100 juta untuk prakarsa pembangunan negara dan perdamaian antara 2014 dan 2020. Selain itu, Uni Eropa adalah salah satu kontributor utama untuk misi perdamaian Uni Afrika ke Somalia AMISOM. Uni Eropa juga menanggapi tantangan keamanan melalui tiga misi keamanan dan pertahanan yg dirilis di bawah naungan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum CSDP, yaitu Misi Pelatihan Militer (EUTM) yang mendukung pasukan keamanan Somalia dan (EUCAP) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim regional serta Misi Angkatan Laut Uni Eropa (EU NAVFOR) untuk mengatasi perompakan yang kesemuanya dilakukan dengan koordinasi dan sinergitas serta kerjasama antar berbagai pihak internasional terkait.

d) Sektor Kemanusiaan

Sejak pemerintahannya runtuh pada tahun 1991, Somalia telah muncul sebagai salahsatu negara yang paling banyak mengalami konflik dan paling tidak berkembang di dunia. Pertempuran terus-menerus antar berbagai faksi dan kurangnya struktur pemerintahan yang efisien, terutama di wilayah selatan dan tengah telah membawa negara ini ke posisi sebagai negara paling tidak damai di dunia pada

⁶⁵[https://eeas.europa.eu/Jalan keluar: Stabilisasi di Somalia melalui bantuan dan dialog,EEAS,2016.](https://eeas.europa.eu/Jalan%20keluar%20Stabilisasi%20di%20Somalia%20melalui%20bantuan%20dan%20dialog,EEAS,2016)

tahun 2011 menurut Global Peace Index. Instabilitas iklim yang demikian, mendorong meningkatnya tindakan kriminalitas dan bisnis kejahatan yang berbahaya seperti terorisme dan perompakan. Hal ini juga diperparah dengan kekeringan dan banjir yang berulang yang melanda Somalia selama bertahun-tahun dan menjadikan negara ini sebagai tempat salah satu krisis kemanusiaan paling dahsyat di dunia.

Bantuan kemanusiaan telah menjadi landasan keterlibatan Uni Eropa di Somalia sebagai bagian dalam upaya mengatasi akar masalah perompakan. Pada tahun 1994, kegiatan proyek kemanusiaan perlahan-lahan dimulai lagi untuk pertama kalinya setelah kerusakan Somalia dan dua Operasi Penjagaan Perdamaian PBB ditahun 1992. Sebagai salah satu donatur terbesar bantuan kemanusiaan menuju Somalia dan Wilayah Tanduk Afrika pada umumnya, selama ini Komisi Eropa secara bertahap terus meningkatkan pendanaannya dari EUR 9 juta pada tahun 2005 dan EUR 18 juta pada tahun 2007 dan kemudian meningkat jadi EUR 46 juta pada tahun 2008. Meskipun ada penurunan EUR 35 juta pada tahun 2010, namun pada tahun-tahun berikutnya EUR 30 juta yang awalnya dialokasikan untuk dukungan penganggaran pada 2011 bertambah menjadi EUR 77 juta karena alasan kekeringan besar-besaran yang mempengaruhi negara Somalia dan juga negara-negara di Kawasan Tanduk Afrika pada umumnya⁶⁶.

Seperti di tempat lainnya, bantuan kemanusiaan Uni Eropa terhadap Somalia menganut prinsip kemanusiaan, kenetralan, ketidak berpihakan, dan kemandirian yang mendasar sebagaimana tercantum dalam Konsensus Eropa tentang bantuan kemanusiaan yang ditandatangani bersama oleh para presiden Komisi, Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa pada Desember 2007. Kebutuhan akan ketidak berpihakan tentang bantuan kemanusiaan dan prioritasnya untuk diarahkan "pertama dan terutama pada

⁶⁶ ECHO Factsheet–Somalia.Humanitarian situation and needs.September 2016

rakyat" telah menjadi salah satu alasan mengapa Ditjen ECHO yang meskipun bukan bagian langsung dari manajemen krisis Uni Eropa dan belum terintegrasi ke dalam struktur EEAS dapat menjadi bagian integral dari pendekatan komprehensif dengan menghormati prinsip-prinsip tersebut⁶⁷.

Adapun badan utama untuk bantuan kemanusiaan dari Uni Eropa yang mendanai operasi bantuan untuk korban bencana alam dan konflik di Somalia yaitu Direktorat Jenderal Komisi Eropa (DG) untuk Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil (ECHO). Dalam melakukan tugas ini, titik fokusnya diprioritaskan untuk keamanan pangan, kesehatan, gizi, tempat tinggal, sanitasi air, promosi kebersihan, dukungan mata pencaharian, perlindungan dan koordinasi bantuan. Dukungan proyek dilaksanakan di sebagian besar negara, namun bantuan darurat yang mendesak terutama terkonsentrasi di wilayah Somalia selatan dan tengah di mana kebutuhannya paling mendesak.

Namun, karena situasi keamanan yang mengerikan, Somalia kemudian dikenal sebagai tempat paling berbahaya di dunia untuk pekerja bantuan kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang berasal dari negara-negara barat. Karena alasan ini, Uni Eropa beroperasi melalui unit-unit Somalia dan perwakilan Uni Eropa di Somalia yang berbasis di Delegasi Uni Eropa yang ada di Kenya dan Nairobi. Sebagian besar pendanaan disalurkan melalui mitra lokal serta LSM dan badan-badan PBB melalui apa yang disebut 'skema kendali jarak jauh'. Tiga kantor lapangan di Mogadishu, Hargeisa (Somaliland), dan Garowe (Puntland) diawasi dengan dominasi penduduk lokal dan juga didukung oleh staf internasional yang ditugaskan untuk pelaksanaan dan pemantauan program yang didanai oleh Uni Eropa⁶⁸.

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸<https://www.unocha.org/story/delivering-assistance-reducing-needsresources-support-resilience-building-urgent-priority2018>.

Dalam hal meningkatkan koordinasi dengan donor lain, ECHO mengambil bagian dalam mekanisme kerjasama informal dan sukarela yang beragam, seperti Koordinasi Dukungan Internasional untuk Somalia (CISS, Badan Koordinasi Bantuan Somalia) diketuai bersama oleh PBB dan Bank Dunia, Somali Donor Group, dan Common Humanitarian Funding (CHF), di mana Ditjen ECHO berpartisipasi sebagai pengamat di Dewan Penasehat.

Dalam siklus pendanaan dari 2008-2013, Uni Eropa mendedikasikan € 422 juta untuk program di Somalia, dengan fokus utama pada pembangunan negara, pendidikan, pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Satu proyek khusus dengan anggaran sebesar € 30 juta, Program Pengembangan Sektor Pendidikan, sebagian dilaksanakan di Somaliland yang merupakan wilayah otonom di utara Somalia dan menangani semua tingkat pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, pendidikan tinggi, pelatihan guru dan peningkatan kapasitas administrasi pendidikan. Sejauh ini, 31 sekolah baru, 194 fasilitas mencuci dan 30 ruang ramah-gadis telah dibangun dan program telah merehabilitasi dan melengkapi 167 ruang kelas. Lebih jauh lagi, Somalia adalah penerima manfaat dari tindakan di bawah Dana Darurat Kepercayaan UE untuk Afrika, khususnya yang berkaitan dengan upaya pembangunan perdamaian, pengelolaan arus migrasi dan pemindahan, untuk mendukung orang-orang terlantar di Somalia, serta pengungsi pengungsi Somalia yang kembali dari negaratetangga. Dukungan tambahan untuk Somalia disalurkan melalui inisiatif UE lainnya, khususnya melalui Instrumen yang berkontribusi untuk Stabilitas dan Perdamaian, Fasilitas Perdamaian Afrika, Program Barang dan Tantangan Global, Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan tiga misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (Nestor EUCAP, EU

Naval Force Atalanta dan Misi Pelatihan Uni Eropa di Somalia)⁶⁹.

e) Sektor Ekonomi

Selama lebih dari dua dekade terakhir dalam kondisi sebagai negara faild state karena dipicu oleh konflik dan bencana serta instabilitas politik, Somalia mengalami kemunduran dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor ekonomi. Dengan frame seperti itu, maka tak heran jika Somalia menempati salah satu peringkat tertinggi diantara negara-negara termiskin di dunia. Dalam memperbaiki kondisi demikian, pemerintahan Federal Somalia membutuhkan kerjasama yang kuat dari aktor internasional dengan kemauan politik dan dukungan yang konferhensif untuk membangun kembali perekonomiannya. Uni Eropa sebagai aktor internasional yang memiliki keinginan dan fokus untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi kemiskinan di kawasan Tanduk Afrika termasuk secara khusus di Somalia, melaksanakan diplomasi aktif dan dukungan untuk proses politik, dukungan keamanan, bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan komprehensif.

Uni Eropa berkomitmen untuk membantu Somalia mengembangkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan yang dapat mendukung proses perdamaian dan pembangunan negara,sertasekaligus mengatasi akar masalah perompakan. Hubungan di bidang ini dipandu oleh proses Somali Compact, New Deal, dan Program Indikatif Nasional. Adapun tujuan dari prioritas dan tindakan juga terkait erat dengan Rencana Pemulihan Ekonomi dari pemerintahan Somalia⁷⁰.

Upaya Uni Eropa meningkatkan kemampuan Somalia dalam sektor perdagangan dilengkapi dengan kerangka Somali Compact dengan tujuan utama untuk membangun

⁶⁹ <https://eeas.europa.eu/homepage/36574/why-investing-security-somalia-matters>, 2017.

⁷⁰ Executif Summary.Federal Republic of Somalia Economic Recovery Plan 2014-2015, Pdf.2013. hal.4.

fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor prioritas tinggi seperti pertanian, bersama dengan rehabilitasi dan perluasan infrastruktur yang penting untuk perdagangan. Intervensi program juga berusaha mendukung pertumbuhan dengan memelihara sektor swasta dan lingkungan bisnis Somalia.

Keterlibatan strategis Uni Eropa dalam Somalia Compact berkaitan dengan revitalisasi dan memperluas perekonomian Somalia dengan fokus pada peningkatan mata pencaharian, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif berbasis luas. Perhatian khusus akan diberikan untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan dan kaum muda, memastikan mereka memiliki akses yang lebih besar ke kegiatan yang menguntungkan dan menghasilkan pendapatan. Bagaimanapun sektor ekonomi memiliki peran penting untuk dimainkan dalam proses pembangunan dan perdamaian di Somalia. Generasi lapangan kerja dapat membantu membangun kepercayaan dalam pemerintahan dan mendorong kohesi sosial. Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pendapatan penting untuk mendukung penyediaan layanan publik dan membangun legitimasi lembaga-lembaga publik. Ekonomi yang membaik, dengan sektor swasta yang dinamis, juga dapat meningkatkan peluang untuk perdamaian dan mengurangi konflik. Hal ini dicapai melalui keterlibatan penduduk secara luas dan inklusif, termasuk diaspora dalam kegiatan produktif. Dalam menangani prioritas yang diidentifikasi perhatian diberikan kepada lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan akses dan peluang perempuan untuk terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan yang menguntungkan sambil berusaha mengatasi hambatan-hambatan utama terhadap partisipasi mereka di bidang ekonomi. Tujuan, prioritas, dan tindakan *Peacebuilding and Statebuilding Goal (PSG)* ini terkait erat

dengan Rencana Pemulihan Ekonomi Pemerintah Federal (ERP)⁷¹.

Meskipun Uni Eropa tidak memiliki banyak kegiatan perdagangan langsung dan formal dengan Somalia yang lebih mitra dagang utamanya kebanyakan berasal dari Yaman dan negara-negara Teluk. Namun Uni Eropa mendorong adanya peningkatan produktivitas di sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk Somalia melalui Program Indikatif Nasional yang membantu memperluas cakrawala perdagangannya. Alokasi indikatif ke Somalia dari Uni Eropa akan menjadi EUR 286 juta dalam dana programmable, yang terbagi sebagai berikut⁷²:

Tabel 4.5: Ringkasan Bantuan Keuangan

Focal Sector 1 : Sate building and	€ 100	35 %
Focal Sector 2 : Food security and	€ 86	30 %
Focal Sector 3 : Education	€ 60	21 %
Cross-cutting : Measures in favour of	€ 14	5 %
Cross-cutting : Support measures	€ 26	9 %
Total	€ 286	100

(Sumber ; National Indicative Programme for Federal Republic of Somalia 2014 to 2020)

Program Indikatif Nasional ini pada prinsipnya seluruh alokasi untuk Somalia untuk periode tahun 2014-2020, meskipun didasarkan pada Somali Compact yang mencakup tahun 2014-2016. Oleh karena itu, Ulasan akan dilakukan pada tahun 2015-2016 yang disinkronkan dengan tinjauan Somali Compact untuk menilai konsekuensi program berikutnya untuk alokasi nasional EDF untuk Somalia.

⁷¹TheSomaliCompact.Somali Peace And Statebuilding Goals PSG 4:Economic Foundations.Pdf.2013.Hal. 8- 9.

⁷²https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-somalia.20140619_pdf.hal.4-5

Melalui kerangka strategis Tanduk Afrika dan dengan pendekatan komprehensif terhadap Somalia dalam berbagai bidang, kerjasama antara Uni Eropa-Somalia memberi efek positif untuk membantu Somalia perlahan keluar dari masalah yang dihadapi. Somalia telah memulai proses rekonstruksi politik dan pemerintahan melalui keterlibatan Uni Eropa yang dipandu oleh Somali Compact dan prinsip-prinsip New Deal untuk negara-negara rapuh yang disepakati di Busan pada tahun 2011. Sejak saat itu, beberapa konferensi dilaksanakan antara pemerintah federal Somalia dengan Uni Eropa dan bekerjasama erat dengan PBB serta sekaligus sebagai kampanye untuk memanggil aktor internasional lain. Berbagai konferensi dan pertemuan yang diadakan bertujuan untuk menyetujui Pakta Keamanan yang menetapkan dasar-dasar bagi keamanan jangka panjang Somalia dan pada Kemitraan Baru untuk Somalia antara Komunitas Internasional dan Somalia berdasarkan prinsip-prinsip pertanggung jawaban bersama. Konferensi juga merupakan kesempatan untuk mengambil stok tanggapan terhadap krisis kemanusiaan yang mempengaruhi Somalia dan menyelesaikan masalah disana⁷³.

Setelah paket dukungan melalui Program Indikatif Nasional senilai € 286 juta yang telah dialokasikan Komisi Eropa di bawah Dana Pembangunan Eropa ke-11 (untuk periode 2014-2020) dalam bentuk hibah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kerjasama dengan badan-badan PBB dan LSM internasional atau kontribusi untuk Dana Perwalian, dimana paket dukungan baru sebesar € 200 juta ditambahkan untuk Somalia. Kesepakatan baru penambahan bantuan difokuskan pada upaya membangun tanggapan yang efektif dan berkelanjutan terhadap tantangan keamanan dalam menciptakan peluang ekonomi dan untuk membangun legitimasi negara dan pemerintahan yang demokratis. Dukungan Uni Eropa akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi Somalia ini akan dilakukan dengan mendukung reformasi yang diperlukan untuk memastikan

⁷³ <https://reliefweb.int/report/somalia/somali-compact.2013>.

Somalia terlibat kembali secara penuh dengan Lembaga Keuangan Internasional, akses ke keuangan multilateral dan penghapusan utang. Ini juga akan membantu meletakkan fondasi untuk proses politik yang lebih inklusif dan stabil termasuk peta jalan menuju pemilu yang lebih inklusif pada 2020⁷⁴.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi Somalia, Uni Eropa juga melakukan pendekatan-pendekatan non militer dengan instrumen bantuan keuangan dan teknis dalam membangun berbagai kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya khususnya dalam bidang pengembangan industri perikanan. Uni Eropa secara aktif mendukung kebijakan nasional sektor perikanan, termasuk pengawasan melalui perjanjian kemitraan perikanan di Samudera Hindia, serta berkontribusi dengan bantuan teknis melalui program ACP - IKAN II dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam termasuk Energi (ENRTP). Meskipun tidak secara langsung berfokus pada upaya kontra-pembajakan, namun tindakan untuk menekan penangkapan ikan ilegal memiliki efek positif dalam meningkatkan kapasitas keamanan maritim regional secara luas⁷⁵.

Dalam fokus mengatasi masalah perompakan Somalia dan masalah krisis negara Somalia pada umumnya yang salah satunya dilakukan melalui dukungan Uni Eropa terhadap pengembangan sektor perikanan dengan membangun kerjasama perjanjian kemitraan perikanan bersama Pemerintah Federal Somalia, Negara Federal Puntland dan Galmudug dan, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Berbagai proyek dalam perjanjian kemitraan perikanan diluncurkan dengan tujuan mempromosikan peluang ekonomi dan menciptakan mata pencaharian alternatif bagi kelompok-kelompok yang lebih berisiko terlibat dalam kegiatan

⁷⁴ Council conclusions on the Horn of Africa 3124th foreign affairs Council meeting Brussels, 14 November 2011

⁷⁵[https://eeas.europa.eu/Melawan_penangkapan_ilegal,_tidak_dilaporkan_dan_tidak_diatur_\(IUU\)_di_Samudra_Hindia](https://eeas.europa.eu/Melawan_penangkapan_ilegal,_tidak_dilaporkan_dan_tidak_diatur_(IUU)_di_Samudra_Hindia).

ilegal. Dengan menciptakan pekerjaan jangka panjang untuk pemuda di komunitas nelayan adalah strategi utama untuk mencegah tumbuhnya perompakan dan mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan maritim.

Salah satu bentuk kerjasama kemaritiman di bawah prakarsa Uni Eropa-IGAD “Program untuk Mendukung Keamanan Maritimes Regional” (MASE) di Afrika Timur dan Selatan - Samudra Hindia Region (ESA-IO) adalah pelaksanaan proyek “Masyarakat Pesisir Terhadap Pembajakan” (CCAP) melalui FAO di wilayah pesisir Puntland, Galmudug dan Mogadishu. Proyek senilai € 5,3 juta tersebut memberikan pelatihan teknis, peralatan, infrastruktur yang lebih produktif dan transfer uang tunai kepada pemuda, wanita dan masyarakat nelayan di area pesisir. Hingga dua ratus pemuda yang tinggal di komunitas pesisir akan menerima perahu nelayan baru dan pelatihan untuk meningkatkan tangkapan, mengurangi biaya dan mengelola sumber daya laut dengan lebih baik. Lebih lanjut, dua ratus pria dan wanita muda dilatih dalam penanganan dan pengolahan ikan untuk meningkatkan praktik dan akses ke pasar. Secara total, lebih dari 1.100 rumah tangga diharapkan mendapat manfaat langsung. Proyek ini berjalan selama dua tahun, tetapi kemitraan publik-swasta yang dibuat antara Pemerintah dan nelayan setempat dirancang untuk mencapai industri perikanan yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pesisir. Proyek serupa ini dibangun di atas keberhasilan kegiatan FAO lainnya di sektor perikanan, termasuk program pembangunan kapal yang melatih pemuda Somalia untuk membuat kapal nelayan murah dan berkualitas tinggi⁷⁶.

Uni Eropa dan sebuah organisasi nirlaba asal Inggris (Oxfom) yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana pada tahun 2014 juga meluncurkan program 3 tahun baru untuk meningkatkan dan

⁷⁶[http://www.fao.org/somalia/programmes-and-projects/Meningkatkan kontribusi nelayan skala kecil/fisheries/en](http://www.fao.org/somalia/programmes-and-projects/Meningkatkan_kontribusi_nelayan_skala_kecil/fisheries/en).

mempertahankan produksi perikanan rakyat Somalia. Termasuk pengolahan dan perdagangan dan pengelolaan pesisir terkait penegakan Konvensi Basel tentang penghapusan dan pembuangan limbah berbahaya. Proyek yang diluncurkan ini merupakan bagian dari program pendanaan € 5 juta yang akan dilaksanakan di Somaliland dan Puntland. Sejauh ini upaya tersebut cukup berhasil dan diperluas ke beberapa wilayah pesisir Somalia lainnya⁷⁷.

Selain itu, Sebagai bagian dari mandat dalam mengisi kesenjangan data informasi tentang pemetaan pergerakan penangkapan ikan dari armada skala kecil di seluruh pantai Somalia. Organisasi Pangan dan Pertanian dengan dukungan dari Uni Eropa telah memberikan pelatihan dan pedoman petunjuk untuk mendaftarkan 3.108 dari perkiraan 6.500 nelayan yang beroperasi di lepas pantai Puntland. Latihan yang dilakukan melalui sistem biometrik yang merangkum informasi pribadi penting dari setiap nelayan, termasuk foto dan sidik jari. Informasi ini kemudian akan digunakan untuk mengembangkan kartu identitas khusus yang akan dibawa oleh nelayan saat berada di laut. Ini juga akan berfungsi sebagai basis data penting bagi Kementerian Perikanan, pasukan keamanan dan anti-pembajakan (baik lokal maupun internasional) dan asosiasi nelayan setempat ketika mereka membutuhkan data tentang jumlah pasti dan lokasi nelayan di daerah tersebut⁷⁸.

Dalam Implementasi Strategi Perikanan Regional untuk Afrika Timur dan Selatan-Wilayah Samudera Hindia oleh Indian Ocean Commission (IOC) Program Smartfish juga dirilis dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan dan integrasi regional yang lebih dalam di wilayah Samudera Hindia melalui peningkatan kapasitas untuk eksploitasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Program bernilai € 21 juta ini didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan

⁷⁷<https://reliefweb.int/report/somalia/eu-boosts-somali-fishingindustry.10/7/2014.html>

⁷⁸ Op.Cit. fao.org/somalia/programmes-and-projects

bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan merupakan yang pertama dari dua fase implementasi, dan termasuk tindakan spesifik untuk mendukung industri perikanan Somalia sebagai salah satu negara penerima manfaat⁷⁹.

Uni Eropa juga terlibat dalam menyerukan dukungan kerjasama kepada komunitas internasional untuk bekerja sama dengan pemerintah Somalia untuk memastikan pemberantasan IUU fishing di perairan Somalia dihentikan. Praktik penangkapan ikan di perairan Somalia tidak boleh dibiarkan terbuka dan bebas untuk semua (free-for-all), sehingga menyebabkan kapal-kapal asing mengeksploitasi ekosistem dengan cara yang tidak berkelanjutan. Tindakan ini akan meningkatkan keamanan maritim dan memajukan industri perikanan domestik yang kuat dan memberikan manfaat serta menunjang penghidupan seluruh warga Somalia. Industri perikanan yang berkelanjutan dan dinamis akan membantu membangun Somalia yang lebih stabil dan sejahtera. Mengingat potensi besar yang dimiliki serta lokasi yang strategis. Namun hal ini akan memerlukan investasi lebih besar untuk perbaikan infrastruktur untuk mewujudkan potensi industri secara maksimal.

Komisi Eropa mendanai sejumlah € 10 juta dalam Rencana Pengawasan Daerah untuk perikanan di South West of the Indian Ocean dari tahun 2007 hingga 2011. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kapal penangkapan ikan secara ilegal di daerah tersebut dan untuk berkontribusi pada konservasi dan manajemen yang berkelanjutan. Uni Eropa bekerjasama dengan pemerintah Somalia untuk menutup celah yang memungkinkan bagi operator ilegal memperoleh keuntungan dari kegiatan memancing yang melanggar IUU⁸⁰.

⁷⁹ Fisheries in the ESA-IO Region: Profile and Trends COUNTRY REVIEW 2014. Fisheries in Public Policies and Food Security.pdf. 2014. hal.7,

⁸⁰ <https://www.project-syndicate.org>. Hassan Sheikh Mohamud. Sustainability and environment. org.

Peraturan Uni Eropa untuk mencegah, menangkal dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal (IUU) mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Komisi bekerja secara aktif dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan Peraturan IUU yang koheren. Sebuah daftar kapal IUU diterbitkan secara teratur, berdasarkan pada kapal IUU yang diidentifikasi oleh Organisasi Manajemen Perikanan Daerah. Penerapan ini memungkinkan produk perikanan laut yang divalidasi sebagai legal oleh negara bendera yang kompeten atau negara pengekspor dapat diimpor ke atau diekspor dari UE. Selain itu, peraturan IUU dapat mengambil langkah-langkah terhadap negara yang menutup mata terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan mengeluarkan peringatan agar dapat mengidentifikasi dan melabeli daftar hitam bagi mereka untuk tidak memerangi IUU fishing. Operator Uni Eropa yang menangkap ikan secara ilegal di mana pun di dunia, di bawah bendera apa pun akan menghadapi hukuman substansial yang sebanding dengan nilai ekonomi tangkapan mereka, sehingga membuat mereka tidak memperoleh keuntungan apapun⁸¹.

⁸¹[https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements_Sustainable_fisheries_partnership_agreements_\(SFPA\)](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements_Sustainable_fisheries_partnership_agreements_(SFPA)).